



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Catatan atas *Laporan Keuangan* **Stasiun PSDKP Ambon** *Audited*

Tahun Anggaran 2024

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



STASIUN PSDKP AMBON



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Stasiun PSDKP Ambon adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Pengawasan SDKP Ambon mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Stasiun PSDKP Ambon. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Ambon, 7 Mei 2025

Kepala Stasiun PSDKP Ambon,



Johanis Johniforus Medea, S.St.Pi

NIP. 19850701 200901 1 002

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	21
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	42
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	56
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	65
F. Pengungkapan Penting Lainnya	69
VI. Lampiran dan Daftar	



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN AMBON**

JL. Ir. M.PUTUHENA, WAILELA- RUMAH TIGA, KEC. TELUK AMBON, 97234
TELEPON. (0911) 351783, FAXIMILE (0911) 351781
LAMAM www.kkp.go.id SUREL psdkp.ambon@kkp.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Stasiun Pengawasan SDKP Ambon terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Ambon, 7 Mei 2025

Kepala Stasiun PSDKP Ambon



Johanis Johniforus Medea, S.St.Pi
NIP. 19850701 200901 1 002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Stasiun PSKDP Ambon Tahun Anggaran 2024 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.901.769. Sedangkan pada Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp25.375.959.817 atau mencapai 78,41% dari alokasi anggaran sebesar Rp32.362.728.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp24.056.477.821 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp472.635.880; Aset Tetap (neto) sebesar Rp23.583.841.941 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp5.675.171 dan Rp24.050.802.650. Jumlah kewajiban dan ekuitas sebesar Rp24.056.477.821.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasional kegiatan, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp(27.074.491.000).

Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp(421.500) sedangkan jumlah beban dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp0 sehingga terdapat surplus dari kegiatan non operasional senilai Rp1.867.769 Dan pos-pos luar biasa sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp27.071.129.231.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp25.756.367.465 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(27.071.129.231). kemudian ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp25.372.058.048 sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp24.050.802.650.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode Tahun Anggaran 2024 *Audited* disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

STASIUN PENGAWASAN SDKP AMBON LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT.	2024				2023
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	REALISASI
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	B					
Pendapatan Negara Bukan Pajak	B.1	0	3.901.769	3.901.769	0	369.113.896
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH		0	3.901.769	3.901.769	0	369.113.896
Belanja	B.2					
Belanja Pegawai	B.3	7.784.089.000	7.758.000.150	(26.088.850)	99.66	5.973.379.343
Belanja Barang	B.4	23.006.405.000	16.050.939.309	(6.955.465.691)	69.77	19.074.133.744
Belanja Modal	B.5	1.572.234.000	1.567.020.358	(5.213.642)	99.67	629.282.139
JUMLAH BELANJA		32.362.728.000	25.375.959.817	(6.986.768.183)	78.41	25.676.795.226

STASIUN PENGAWASAN SDKP AMBON
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
ASET	C		
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Belanja Dibayar di Muka	C.2	16.000.000	29.166.666
Piutang Bukan Pajak	C.3	0	540.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.4	0	(2.700)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.5	0	537.300
Persediaan	C.6	456.635.880	554.341.669
Jumlah Aset Lancar		472.635.880	584.045.635
ASET TETAP			
Tanah	C.7	6.248.730.383	6.248.730.383
Peralatan dan Mesin	C.8	45.677.071.631	42.957.735.716
Gedung dan Bangunan	C.9	7.580.062.080	7.288.390.955
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.10	836.498.084	595.269.351
Kontruksi dalam pengerjaan	C.11	239.903.713	239.903.713
Akumulasi Penyusutan	C.12	(36.998.423.950)	(32.144.343.239)
Jumlah Aset Tetap		23.583.841.941	25.185.686.879
ASET LAINNYA			
Aset Lain-Lain	C.13	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.14	0	0
Jumlah Aset Lainnya		0	0
JUMLAH ASET		24.056.477.821	25.769.732.514
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.15	5.675.171	13.365.049
Utang yang Belum ditagihkan	C.16	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.17	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		5.675.171	13.365.049
JUMLAH KEWAJIBAN		5.675.171	13.365.049
EKUITAS			
Ekuitas	C.18	24.050.802.650	25.756.367.465

JUMLAH EKUITAS		24.050.802.650	25.756.367.465
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		24.056.477.821	25.769.732.514

STASIUN PENGAWASAN SDKP AMBON
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	1.494.000	332.470.666
JUMLAH PENDAPATAN		1.494.000	332.470.666
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	7.760.385.321	5.959.371.343
Beban Persediaan	D.3	153.992.397	111.984.266
Beban Barang dan Jasa	D.4	10.393.501.096	13.998.759.594
Beban Pemeliharaan	D.5	2.389.981.540	2.384.029.971
Beban Perjalanan Dinas	D.6	3.214.261.682	2.414.355.975
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D.8		
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	3.162.368.964	3.024.691.516
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10		0
JUMLAH BEBAN		27.074.491.000	27.893.192.665
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(27.072.997.000)	(27.560.721.999)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus/defisit Pelepasan Aset Non Lancar		1.446.269	32.865.024
Pendapatan Penjualan Aset Non Lancar		1.446.269	36.540.024
Beban Penjualan Aset Non Lancar		0	3.675.000
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		421.500	103.206
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		421.500	103.206
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11	1.867.769	32.968.230
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa		(27.071.129.231)	(27.527.753.769)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan Luar Biasa		0	0
Beban luar biasa		0	0
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS (DEFISIT) LO		(27.071.129.231)	(27.527.753.769)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

STASIUN PENGAWASAN SDKP AMBON
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	25.756.367.465	28.037.367.163
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(27.071.129.231)	(27.527.753.769)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.3	25.372.058.048	25.305.561.455
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(1.705.564.815)	(2.280.999.698)
EKUITAS AKHIR	E.4	24.050.802.650	25.756.367.465

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun Pengawasan SDKP Ambon

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon merupakan bagian dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Stasiun PSDKP memiliki misi yaitu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, meningkatkan efektifitas penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP.

Wilayah kerja Stasiun PSDKP Ambon merupakan Wilayah Pengelolaan Perairan Republik Indonesia (WPP-RI) 714 dan 715. WPP-RI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Wilayah kerja Stasiun PSDKP Ambon berdasarkan Provinsi meliputi Perairan Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi yang di emban adalah melakukan penyusunan rencana, program

dan evaluasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan penanganan pelanggaran evaluasi penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan operasional dan persiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, melaksanakan perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana pengawasan, serta melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Stasiun PSDKP Ambon berkomitmen dengan visi yang mengacu kepada visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk **“Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”**. Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Peningkatan Kualitas Manusia, melalui peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan
- Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional.
- Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Stasiun PSDKP Ambon memiliki Pegawai ASN sebanyak 65

(enam puluh lima) pegawai yang terbagi atas PNS sebanyak 48 (empat puluh delapan) pegawai dan PPPK sebanyak 17 (tujuh belas) pegawai. Selain itu terdapat PPNPN dan PJLP sebanyak 23 (dua puluh tiga) pegawai. Stasiun PSDKP Ambon di pimpin oleh Kepala Stasiun dengan level setara eselon 4 dan dibantu oleh 1 (satu) eselon 5 yaitu Kepala Urusan Umum.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 *Audited* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun Pengawasan SDKP Ambon. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari modul General Ledger dan Pelaporan (GLP) dan modul Aset pada aplikasi SAKTI Kemenkeu. Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP) menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan modul Aset adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Stasiun PSDKP Ambon menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui

pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun Pengawasan SDKP Ambon dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 *Audited* telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian

laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Perbendaharaan Nomor 42 Tahun 2014 yang merupakan entitas pelaporan dari Stasiun PSDKP Ambon. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sehubungan dengan Implementasi Metode Penilaian Persediaan secara First In First Out (FIFO) di tahun 2021 sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3/PB/PB.6/2021 tanggal 22 Januari 2021, maka pencatatan transaksi mutasi persediaan baik persediaan masuk dan persediaan keluar agar dilakukan sesuai dengan urutan kronologis transaksi.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Stasiun PSDKP Ambon adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

Pendapatan- LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas

pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan adalah sebagai berikut: Penerimaan Negara Bukan Pajak

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau

timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa

diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain tanah.
 - Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai

perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang **d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

f. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar

Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

g. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Stasiun PSDKP Ambon telah melakukan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 15 (lima belas) kali dari DIPA Awal. Terdapat penambahan pagu anggaran dari pagu awal sebesar Rp31.818.728.000 menjadi Rp32.362.728.000, yaitu pergeseran anggaran 2351.BCE.U04_Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana Rp68.000.000 dari satker Stasiun PSDKP Ambon ke satker Stasiun PSDKP Tarakan dan penambahan belanja gaji pegawai sebesar Rp612.000.000. Rincian anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan Negara		
Pendapatan Perpajakan		
Pajak	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	7,172,089,000	7,784,089,000
Belanja Barang	23,077,445,000	23,006,405,000
Belanja Modal	1,569,194,000	1,572,234,000
Jumlah Belanja	31,818,728,000	32,362,728,000

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada Stasiun PSDKP Ambon terdapat alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional I dan V dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing – masing Prioritas Nasional yang pelaksanaannya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional I - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Pelaksanaannya

di antaranya melalui 1 program prioritas, 5 kegiatan prioritas, yang tersebar di Stasiun PSDKP Ambon dengan pagu mencapai Rp18.439.255.000 dan realisasi sebesar Rp11.667.846.222 dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	%
2350	QDD	'001	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP	300,000,000	290,125,714	96.71
2350	QHD	'001	Operasi Kapal Pengawas	13,723,860,000	7,287,616,748	53.10
2350	QHD	'003	Operasi Speedboat Pengawas	985,062,000	982,258,282	99.72
2352	QIC	'001	Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	700,000,000	639,454,773	91.35
2352	QIC	'002	Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak	115,000,000	114,212,297	99.32
2353	QIC	'004	Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya	720,000,000	661,404,754	91.86
2350	RCG	'001	Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat	1,895,333,000	1,692,773,654	89.31
Jumlah				18,439,255,000	11,667,846,222	63.28

2. Prioritas Nasional V – Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 program prioritas, 1 kegiatan prioritas, yang tersebar di Stasiun PSDKP Ambon dengan pagu sebesar Rp272.160.000 dan realisasi sebesar Rp253.255.989 dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	%
2350	RBQ	001	Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun	272,160,000	253,255,989	93.05
Jumlah				272,160,000	253,255,989	93.05

Satuan kerja Stasiun PSDKP Ambon (215141) telah melakukan revisi DIPA sebanyak 15 (lima belas) kali, dengan rincian sebagai berikut:

1. Revisi DIPA ke 01

DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2024 Tanggal 25 Januari 2024, kode *Digital Stamp (DS)* : 3320-9868-9676-2402 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp31.818.728.000.

Revisi ke-01 merupakan revisi kewenangan DJA. Kode digital stamp mengalami perubahan. Revisi 2 merupakan revisi Refocusing (pemblokiran) dan buka blokir dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Pemblokiran detail anggaran 2350.RCG.001.052.A.523121-Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Cadangan AA - Servis Perlengkapan Navigasi dan Komunikasi Rp148.162.000,00)
- ✓ Pemblokiran detail anggaran 2350.RCG.001.052.C.524111-Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Cadangan AA - Uang Harian Rp2.580.000,00; Cadangan AA - Biaya Transport Rp39.390.000,00; dan Cadangan AA - Penginapan Rp5.868.000,00)
- ✓ Pemblokiran detail anggaran 2352.QIC.001.052.D.524111-Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Cadangan AA - Biaya Transport Rp60.000.000,00)
- ✓ Buka Blokir detail anggaran 2355.CAN.001.051.A.532111-Belanja Modal Peralatan dan Mesin (PC Rp34.500.000,00; Laptop 1 Rp35.300.000,00; Laptop 2 Rp74.200.000,00; dan Scanner Portable Rp6.000.000,00)
- ✓ Pemblokiran detail anggaran 2355.EBA.958.052.B.524111-Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Cadangan AA - Uang Harian Rp1.720.000,00; Cadangan AA - Biaya Transport Rp5.480.000,00; dan Cadangan AA - Penginapan Rp1.800.000,00)
- ✓ Pemblokiran detail anggaran 2355.EBA.994.002.C.523111-Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Kantor Stasiun PSDKP Ambon Rp66.000,00)

- ✓ Buka Blokir detail anggaran 2355.EBB.971.051.A.523111-Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Renovasi Ruang Pimpinan Rp42.000.000,00; Renovasi Ruang Rapat Rp48.000.000,00; Renovasi Ruang Kepala Urusan Umum Rp22.000.000,00; Renovasi Lobby Rp36.000.000,00; dan Renovasi Kitchen Set Rp23.000.000,00)
- ✓ Pemblokiran detail anggaran 2355.EBC.996.052.A.524111-Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Cadangan AA - Uang Harian Rp6.440.000,00; Cadangan AA - Biaya Transport Rp29.957.000,00; dan Cadangan AA - Penginapan Rp5.240.000,00)
- ✓ Pemblokiran detail anggaran 2355.EBD.961.054.A.524111-Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Cadangan AA - Uang Harian Rp1.720.000,00; Cadangan AA - Biaya Transport Rp5.480.000,00; dan Cadangan AA - Penginapan Rp1.800.000,00)

2. Revisi DIPA ke 02 DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2024 tanggal 20 Februari 2024, kode *Digital Stamp (DS)* : 3320-9868-9676-2402 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp31.818.728.000. Revisi ke-02 merupakan revisi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Maluku. Kode *digital stamp* mengalami perubahan.

Revisi ke 04 merupakan Revisi Anggaran Dalam Hal Pagu Anggaran Tetap dan Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan. Adapun Revisi Anggaran Dalam Hal Pagu Anggaran Tetap dan Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan tersebut antara lain :

- ✓ Perubahan nomenklatur detil 2352.CAL.001.051.A.532111-Belanja Modal Drone (Rp25.000.00,00) dan menjadi Drone bawah air dan perlengkapan (Rp25.000.00,00); dan
- ✓ Pemutakhiran RPD Halaman III DIPA pada aplikasi Sakti dan disesuaikan dengan aplikasi OMSPAN.

3. Revisi DIPA ke 03

DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2024 tanggal 4 April 2024, kode *Digital Stamp (DS)* : 3320-9868-9676-2402 dengan Nilai Pagu Anggaran

Rp31.818.728.000. Kode digital stamp tidak mengalami perubahan Revisi ke-03 adalah revisi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Maluku, yang merupakan Revisi Halaman III DIPA.

4. Revisi DIPA ke 04

DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2024 Tanggal 1 Mei 2024, kode *Digital Stamp (DS)* : 0331-0102-2619-2073 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp31.818.728.000. Kode digital stamp mengalami perubahan Revisi ke-04 merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran – Kementerian Keuangan. Revisi buka blokir dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Revisi Anggaran buka blokir anggaran Alokasi operasional perkantoran (002) berupa pemeliharaan barang. Usulan revisi anggaran yang dilakukan adalah Pergeseran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Kantor Stasiun PSDKP;
- ✓ Revisi Anggaran buka blokir anggaran PNPB yang terdiri dari: akun 2350.QHD.001.052.A.521211 Belanja Bahan Pelumas (1 unit kapal) dan Bahan Bakar Minyak (1 unit kapal); akun 2350.QHD.001.052.A.522191 Belanja Jasa Lainnya Ongkos Angkut BBM; akun 2350.QHD.001.052.C.521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Uang Jaga Sandar KP. Hiu 13 dan Biaya Delegasi KP. Hiu 13.

5. Revisi DIPA ke 05

DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2024 Tanggal 1 Mei 2024, kode *Digital Stamp (DS)* : 0331-0102-2619-2073 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp31.818.728.000. Kode digital stamp tidak mengalami perubahan. Revisi ke-05 revisi Halaman III DIPA dan pemutakhiran KPA.

6. Revisi DIPA ke 06

DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2024 Tanggal 08 Juli 2024, kode *Digital Stamp (DS)* : 0331-0102-2619-2073 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp31.818.728.000. Kode digital stamp tidak mengalami

perubahan. Revisi ke-06 adalah revisi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Maluku, dengan rincian sebagai berikut:

- ✓ Pergeseran anggaran pada akun 2352.BIC.004.052.A.522191-Belanja Jasa Lainnya ke 2352.BIC.004.052.A.524111-Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp100.000,00;
- ✓ Pergeseran anggaran pada akun 2352.QIC.001.052.E.524119-Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp48.062.000,00 ke 2352.QIC.001.052.E.524111-Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp48.060.000,00 dan 2352.QIC.001.053.A.524111-Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp2.000,00;
- ✓ Pergeseran anggaran pada akun 2353.QIC.004.052.A.524113- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ke 2353.QIC.004.051.B.524113- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp600.000,00;
- ✓ Pergeseran anggaran pada Belanja pegawai;
- ✓ Pemutakhiran RPD Halaman III DIPA pada aplikasi Sakti dan disesuaikan dengan aplikasi OMSPAN.

7. Revisi DIPA ke 07

DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2024 Tanggal 10 September 2024, kode *Digital Stamp (DS)* : 0331-0102-2619-2073 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp31.818.728.000. Kode digital stamp tidak mengalami perubahan. Revisi ke-07 adalah revisi kewenangan KPA Stasiun PSDKP Ambon dan Revisi Halaman III DIPA, dengan rincian sebagai berikut:

- ✓ Perubahan akun yang semula 2350.QHD.001.052.B.534161 menjadi akun 2350.QHD.001.052.B.532111.
- ✓ Pergeseran anggaran pada kegiatan 2351;
- ✓ Perubahan detail pada akun 2351.BCE.UO3.051.A.524111;
- ✓ Pergeseran anggaran pada kegiatan 2352;
- ✓ Pergeseran anggaran pada kegiatan 2353;
- ✓ Pergeseran anggaran pada kegiatan 2353

8. Revisi DIPA ke 08

DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2024 Tanggal 27 September 2024, kode *Digital Stamp (DS)* : 0331-0102-2619-2073 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp31.818.728.000. Kode digital stamp tidak mengalami perubahan. Revisi ke-08 adalah revisi kewenangan Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Negara Prov. Maluku, dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Pergeseran anggaran pada kegiatan 2350;
- ✓ Perubahan pada detil akun 2350.RCG.001.051.C.523121;
- ✓ Pergeseran anggaran pada kegiatan 2352;
- ✓ Pergeseran anggaran pada kegiatan 2353;
- ✓ Pergeseran anggaran pada kegiatan 2355.

9. Revisi DIPA ke 09

DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2024 Tanggal 1 Oktober 2024, kode *Digital Stamp (DS)* : 1174-7956-5908-1644 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp31.818.728.000. Kode digital stamp mengalami perubahan. Revisi ke-09 adalah revisi kewenangan Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Negara Prov. Maluku, berupa Pemutakhiran RPD Halaman III DIPA pada aplikasi Sakti dan disesuaikan dengan aplikasi OMSPAN.

10. Revisi DIPA ke 10

DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2024 Tanggal 04 November 2024, kode *Digital Stamp (DS)* : 2600-0132-9098-0028 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp31.818.728.000. Kode digital stamp mengalami perubahan. Revisi ke-10 adalah revisi kewenangan Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Negara Prov. Maluku, yaitu pergeseran anggaran pada akun 2355.EBA.994.001.A.512211-Belanja Uang Lembur ke 2355.EBA.994.001.D.512414-Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK sebesar Rp51.840.000.

11. Revisi DIPA ke 11

DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2024 Tanggal 21 November 2024, kode

Digital Stamp (DS) : 8736-8127-5885-9178 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp31.818.728.000. Kode digital stamp mengalami perubahan. Revisi ke-11 adalah revisi dalam rangka menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024. Revisi pencantuman dalam catatan halaman IV.A DIPA dilaksanakan di Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Negara Prov. Maluku.

12. Revisi DIPA ke 12

DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2024 Tanggal 11 Desember 2024, kode *Digital Stamp (DS)* : 9465-0300-0898-7917 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp32.362.728.000. Kode digital stamp mengalami perubahan. Revisi ke-12 merupakan Revisi kewenangan Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Kementerian Keuangan RI, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pergeseran anggaran 2351.BCE.U04_Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana Rp68.000.000,00 dari satker Stasiun PSDKP Ambon ke satker Stasiun PSDKP Tarakan.
- b. Penambahan output pada 2355.EBA.956_layanan BMN dari 6 layanan menjadi 7 layanan.
- c. Penambahan belanja gaji pegawai sebesar Rp612.000.000.

13. Revisi DIPA ke 13

DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2024 Tanggal 13 Desember 2024, kode *Digital Stamp (DS)* : 9465-0300-0898-7917 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp31.818.728.000. Kode digital stamp tidak mengalami perubahan. Revisi ke-13 merupakan Revisi kewenangan Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Negara Prov. Maluku, dengan rincian sebagai berikut: Pergeseran anggaran pada 2355.EBA.994.001.A.511125_Belanja Tunj. Pajak Penghasilan Rp4.590.000; 2355.EBA.994.001.A.512211

Belanja Uang Lembur Rp7.863.000;
 2355.EBA.994.001.C.512212 Belanja Uang Lembur PPPK
 Rp11.312.000 ke 2355.EBA.994.001.B.512411 Belanja
 Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja Rp16.265.000
 dan 2355.EBA.994.001.D.512414 Belanja Pegawai Tunjangan
 Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK Rp7.500.000.

14. Revisi DIPA ke 14

DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2024 Tanggal 16 Desember 2024, kode Digital Stamp (DS) : 9465-0300-0898-7917 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp32.362.728.000. Kode digital stamp tidak mengalami perubahan. Revisi ke-14 merupakan Revisi kewenangan Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Negara Prov. Maluku, dengan rincian sebagai berikut: Pergeseran anggaran pada 2355.EBA.994.001.B.512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) PNS ke 2355.EBA.994.001.B.512414 Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK sebesar Rp1.500.000.

15. Revisi DIPA ke 15

DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2024 Tanggal 27 Desember 2024, kode Digital Stamp (DS) : 9465-0300-0898-7917 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp32.362.728.000. Kode digital stamp tidak mengalami perubahan. Revisi ke-15 merupakan Revisi kewenangan Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Negara Prov. Maluku, dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Pergeseran anggaran pada 2350.QHD.001.052.B.521211 Belanja Bahan ke 2350.QHD.001.052.A.521211 Belanja Bahan sebesar Rp1.260.000.
- ✓ Pergeseran anggaran pada 2350.QHD.003.052.B.521211 Belanja Bahan ke 2350.QHD.003.052.D.521211 Belanja Bahan sebesar Rp6.981.000.
- ✓ Pergeseran anggaran pada 2350.RCG.001.052.F.532121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ke

2350.RCG.001.052.D.532121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp420.000.

- ✓ Pergeseran anggaran pada 2352.BIC.004.052.A.524113 Belana Perjalanan Dinas Dalam Kota ke 2352.BIC.004.052.A.524111 Belana Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp150.000.
- ✓ Pergeseran anggaran pada 2353.QIC.004.052.A.524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa ke 2353.QIC.004.053.A.524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp4.440.000.
- ✓ Pergeseran anggaran pada 2355.EBA.958.052.A.521211 Belanja Bahan ke 2355.EBA.958.052.E.521211 Belanja Bahan Rp1.440.000.
- ✓ Pergeseran anggaran pada 2355.EBA.994.002.A.521111 Belanja Keperluan Perkantoran Rp7.272.000,00; 2355.EBA.994.002.A.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Rp1.080.000; 2355.EBA.994.002.G.522141 Belanja Sewa Rp2.352.000 ke 2355.EBA.994.002.E.521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Rp10.704.000.

Realisasi
Pendapatan
Rp3.901.769

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.901.769 atau mencapai 0% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNB

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Desember 2024		
	Estimasi Pendapatan	Realisasi	% Real Pendapatan
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha (4251)	0	1,446,269	0
Pendapatan Denda (4258)	0	1,494,000	0
Pendapatan Lain-Lain (4259)	0	961,500	0
Jumlah	0	3,901,769	0

Pendapatan PNBPN antara lain berasal dari Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan (4251), Pendapatan Denda (4258) dan Pendapatan Lain-Lain (4259) dengan rincian sebagai berikut :

- Realisasi Pendapatan dari Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha (4251) yaitu **Penjualan Peralatan dan Mesin (425122)** untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.446.269 atau mencapai 0% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan berasal dari hasil lelang peralatan dan mesin, yaitu 1 (satu) paket inventaris kantor berupa peralatan dan mesin kondisi rusak berat sebesar Rp1.446.269 dengan risalah Lelang Nomor 48/17.01/2024-01 TA

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha (4251)
(dalam rupiah)*

URAIAN	31 Desember 2024		
	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122)	0	1,446,269	0
Jumlah	-	1,446,269	-

Target pendapatan Stasiun PSDKP Ambon dengan estimasi sebesar Rp0 berasal dari Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin (425122), pendapatan tersebut disetorkan kembali ke negara melalui bendahara pengeluaran Stasiun PSDKP Ambon.

- Realisasi Pendapatan Denda Denda (4258) yaitu **Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (425811)** untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.494.000 atau mencapai 0% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan berasal dari keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan suku cadang speedboat sebesar Rp1.494.000 yang dibayarkan melalui potongan SPM No. 00467, dengan perhitungan keterlambatan selama 15 (lima belas) hari.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Denda (4258)
(dalam Rupiah)

URAIAN	31 Desember 2024		
	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (425811)	0	1,494,000	0
Jumlah	-	1,494,000	-

Target pendapatan Stasiun PSDKP Ambon dengan estimasi sebesar Rp0 berasal dari Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (425811), pendapatan tersebut disetorkan kembali ke negara melalui bendahara pengeluaran Stasiun PSDKP Ambon.

- Realisasi Pendapatan Lain-lain (4259) yaitu **Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (425911)** untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp961.500 atau mencapai 0% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (425911), dengan rincian sebagai berikut :

*Rincian Estimasi dan Realisasi
Pendapatan Pendapatan Lain-lain (4259)*
(dalam Rupiah)

URAIAN	31 Desember 2024		
	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (425911)	0	961,500	0
Jumlah	-	961,500	-

- ✓ Kelebihan pembayaran uang makan PNS bulan Desember 2023 a.n M, Asrar Kelian, Martin Yermias Luhulima, M. Effenfy Sadjid, Ali Tamher, dan Nedyia Ibrahim dengan total sebesar Rp421.500. Nomor NTB : 000000250303 dan nomor NTPN : 83A567QLUON8KC38 tanggal 10 Januari 2024.
- ✓ Kelebihan pembayaran Tunjangan Jabatan Umum tahun 2021 a.n Lailia Nur Rohmah, S.Pi senilai Rp185.000, dengan Nomor NTB : 000000784703 dan Nomor NTPN : 634EC48VVEN8QKGS tanggal 29 April 2024.

- ✓ Kelebihan pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional tahun 2021 a.n Lailia Nur Rohmah, S.Pi senilai Rp355.000, dengan Nomor NTB : 000000782166 dan Nomor NTPN : 134B82G4VPIG0K4R tanggal 29 April 2024.

*Perbandingan Estimasi dan Realisasi Pendapatan Denda (4258)
(dalam Rupiah)*

URAIAN	2024	2023	%
Penerimaan Perpajakan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	3,901,769.00	369,113,896	(98.94)
Penerimaan Hibah	-	-	-
Jumlah Belanja	3,901,769	369,113,896	(98.94)

Total dari pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak senilai Rp3.901.769. Dari tabel perbandingan diatas terlihat adanya penurunan pendapatan pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 98,94%, dikarenakan Pendapatan Denda Lainnya yang berasal dari denda administratif kapal perikanan yang disetorkan kembali ke negara saat ini dilakukan oleh Bendahara Penerimaan Eselon 1.

Realisasi Belanja **B.2 Belanja**

Negara

Rp15.604.770.507

Realisasi Belanja Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp15.604.770.507 atau 78,42% dari anggaran belanja sebesar Rp32.362.728.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
sampai dengan 31 Desember 2024*

(dalam Rupiah)

URAIAN	31 Desember 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	7,784,089,000	7,765,291,560	99.76
Belanja Barang	23,006,405,000	16,058,335,309	69.80
Belanja Modal	1,572,234,000	1,567,020,358	99.67
Total Belanja Kotor	32,362,728,000	25,390,647,227	78.46
Pengembalian	-	14,687,410	
Jumlah	32,362,728,000	25,375,959,817	78.41

Realisasi anggaran menurut jenis belanja pada tabel diatas, memperlihatkan bahwa sampai dengan 31 Desember 2024 penyerapan anggaran sebesar 78,42%. Pengembalian belanja senilai Rp14.687.410 yang berasal dari Belanja Pegawai (51) sebesar Rp7.291.410 dan Belanja Barang (52) sebesar Rp7.396.000.

Perbandingan Realisasi Belanja TA. 2024 dan TA. 2023
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	%
Belanja Pegawai	7,758,000,150	5,973,379,343	29.88
Belanja Barang	16,050,939,309	19,074,133,744	(15.85)
Belanja Modal	1,567,020,358	629,282,139	149.02
Jumlah Belanja	25,375,959,817	25,676,795,226	(1.17)

Secara keseluruhan realisasi belanja hingga 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 1,17% jika dibandingkan dengan realisasi belanja pada tahun sebelumnya, terutama pada belanja barang. Pagu anggaran Operasional Kapal Pengawas antara lain Bahan Bakar, pelumas, biaya delegasi dan biaya jaga sandar, dan ongkos angkut bahan bakar Kapal Pengawas merupakan bagian dari sumber dana PNBP dimana hanya disetujui dan ditetapkan sebesar 60% pada Maksimum Pencairan PNBP Tahap I TA 2024, sesuai surat Nomor S-253/PB.2/2024 tanggal 16 Juli 2024 perihal Penetapan Maksimum Pencairan PNBP Tahap I TA 2024 pada Satker Lingkup DJPT dan DJPSDKP yang dikeluarkan oleh Direktur Pelaksana Anggaran, Kementerian Keuangan.

Belanja Pegawai
Rp7.758.000.150

B.3 Belanja Pegawai
Realisasi Belanja Pegawai Stasiun PSKDP Ambon sampai dengan periode 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp7.758.000.150 dan Rp5.973.379.343. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja pegawai pada Stasiun PSDKP terdiri dari 48 (empat puluh delapan) orang pegawai PNS dan 17 (sembilan belas)

orang PPPK. Dibandingkan dengan periode Desember 2023, realisasi belanja pada tahun ini mengalami kenaikan sebesar 29,88% dibandingkan dengan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan dengan bertambahnya 7 (tujuh) orang pegawai PPPK dan adanya tunjangan kinerja 100% pada gaji 13 dan 14.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
TA. 2024 dan TA. 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023	%
Belanja Gaji Pokok PNS	2,374,936,500	2,203,787,640	7.77
Belanja Pembulatan Gaji PNS	37,242	36,134	3.07
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	174,606,570	160,550,590	8.75
Belanja Tunj. Anak PNS	56,468,412	48,979,820	15.29
Belanja Tunj. Struktural PNS	12,600,000	12,600,000	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	40,180,000	36,670,000	9.57
Belanja Tunj. PPh PNS	10,512,940	0	-
Belanja Tunj. Beras PNS	143,391,600	141,146,580	(50.16)
Belanja Uang Makan PNS	250,336,000	287,691,000	163.96
Belanja Tunjangan Umum PNS	90,390,000	94,840,000	(36.32)
Belanja Gaji Pokok PPPK	660,969,200	141,939,000	22,367,724.03
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	14,460	2,955	(99.83)
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	38,764,560	8,420,550	3,453.74
Belanja Tunjangan Anak PPPK	6,160,080	1,090,810	(52.25)
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	56,640,000	12,900,000	682.10
Belanja Tunjangan Beras PPPK	33,313,200	7,242,000	102.78
Belanja Uang Makan PPPK	65,261,000	16,428,000	9.14
Belanja Uang Lembur	60,601,000	59,796,000	896.07
Belanja Uang Lembur PPPK	39,706,000	6,084,000	(98.43)
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	2,782,524,026	2,525,253,119	1,237.61
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	867,878,770	208,022,357	(85.47)
Jumlah Belanja Kotor	7,765,291,560	5,973,480,555	30.00
Pengembalian Belanja	7,291,410	101,212	7,104.10
Jumlah Belanja	7,758,000,150	5,973,379,343	29.88

Pengembalian Belanja senilai Rp7.291.410 berasal dari pengembalian pembulatan gaji PNS senilai Rp1.236 dan PPPK Rp174, pengembalian uang makan PPPK (11 pegawai) senilai Rp6.930.000, serta pengembalian Belanja pegawai tunjangan jabatan umum pegawai yang melaksanakan tugas belajar a.n Zulkarnain senilai Rp360.000.

Belanja Barang **B.4 Belanja Barang**

Rp16.050.939.309

Realisasi Belanja Barang sampai dengan bulan 31 Desember 2024 dan

2023 adalah masing-masing sebesar Rp16.050.939.309 dan Rp19.074.133.744.

*Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA. 2024 dan TA. 2023
(dalam rupiah)*

URAIAN	2024	2023	%
Belanja Barang Operasional (5211)	1,448,856,357	1,601,078,592	(9.51)
Belanja Barang Non Operasional (5212)	8,252,726,533	11,774,065,323	(29.91)
Belanja Barang Persediaan (5218)	115,667,370	125,879,723	(8.11)
Belanja Jasa (5221)	688,826,589	626,149,516	10.01
Belanja Pemeliharaan (5231)	2,330,600,778	2,532,949,615	(7.99)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241)	3,160,754,632	2,414,355,975	30.92
Belanja Perjalanan Luar Negeri (5242)	60,903,050	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	16,058,335,309	19,074,478,744	(15.81)
Pengembalian Belanja	7,396,000	345,000	-
Jumlah Belanja	16,050,939,309	19,074,133,744	(15.85)

- Belanja barang operasional (5211) sebesar Rp1.448.856.357 terdiri dari : belanja untuk keperluan perkantoran, penambah daya tahan tubuh, pengiriman surat dinas pos pusat, dan honor operasional satuan kerja.
- Belanja barang non operasional (5212) sebesar Rp8.252.726.533 antara lain belanja bahan seperti cetak laporan, BBM, pelumas, air tawar kapal pengawas, belanja honor output kegiatan serta belanja barang non operasional lainnya seperti konsumsi rapat.
- Belanja barang persediaan barang konsumsi (5218) sebesar Rp115.667.370 meliputi belanja ATK, komputer Supply, dan suku cadang.
- Belanja barang jasa (5221) sebesar Rp688.826.589 meliputi belanja langganan listrik, telepon, air, belanja sewa, belanja jasa lainnya, belanja jasa profesi untuk menunjang kegiatan dan belanja jasa lainnya.
- Belanja pemeliharaan (5231) sebesar Rp2.330.600.778, yang dilakukan untuk menjaga nilai aset-aset yang ada di Stasiun PSDKP Ambon antara lain

pemeliharaan gedung dan bangunan, kapal pengawas dan *speedboat/rubberboat* pengawasan dan pemeliharaan peralatan dan mesin, serta belanja persediaan pemeliharaan peralatan dan mesin.

- Belanja perjalanan dalam negeri (5241) sebesar Rp3.153.358.632 meliputi kegiatan pembayaran belanja perjalanan biasa, perjalanan dinas dalam kota, Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota dan luar kota.
- Belanja Perjalanan Luar Negeri (5242) sebesar Rp60.903.050 berupa Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri.

Pada periode akhir Desember 2024 terdapat sisa bahan bakar minyak (BBM) berjenis Dexlite pada Kapal Pengawasan Kelautan dan Perikanan Hiu 13 yang memiliki sisa BBM sebanyak 3.950 Liter dengan nilai Rp84.589.250 yang mengikuti acuan harga per-liter nya untuk wilayah 4 (Indonesia Timur) Rp21.415 (termasuk pajak).

Terdapat pengembalian belanja barang operasional dengan total sebesar Rp7.396.000 berasal dari pengembalian kegiatan sebagai berikut :

- Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Rapat Kerja Teknis (RAKERNIS) Pengawasan SDKP a.n Martin Yermias Luhulima senilai Rp5.876.000, dan
- Perjalanan dinas kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan TA 2023 dan Perencanaan Kegiatan tahun 2024 a.n Yochni A Idrus senilai Rp1.520.000.

Belanja Modal
Rp1.567.020.358

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sampai dengan bulan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.567.020.358 dan Rp629.282.139. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang membeli manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA. 2024 dan TA. 2023*

(dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin (5321)	1,034,120,500	532,774,188	94.10
Belanja Modal Gedung dan Bangunan (5331)	291,671,125	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (5341)	241,228,733	96,507,951	149.96
Jumlah Belanja Kotor	1,567,020,358	629,282,139	149.02
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	1,567,020,358	629,282,139	149.02

Belanja modal pada Stasiun PSDKP Ambon terdiri dari Belanja modal peralatan dan mesin (5321) sebesar Rp 1,034,120,500, Belanja Modal Gedung dan Bangunan (5331) sebesar Rp 291,671,125, dan Belanja modal jalan, Irigasi dan Jaringan (5341) sebesar Rp241.228.733. Perbandingan nilai Belanja Modal hingga 31 Desember 2024 dan 2023 pada tabel diatas, memperlihatkan adanya kenaikan realisasi pada belanja modal peralatan dan mesin sebanyak 149,02%.

*Belanja Modal
Tanah Rp0*

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Stasiun PSDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan lalu.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA. 2024 dan TA. 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Sawah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp1.034.120.500*

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.034.120.500 dan Rp532.774.188. Rincian realisasi belanja modal

peralatan dan mesin hingga 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin hingga 31 Desember 2024
(dalam Rupiah)*

No	Nama Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Total
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Unit	283,800,000
2	Alat Ukur Universal Lainnya	1	dummy	18,870,000
3	Lemari Besi/Metal	2	Buah	5,990,000
4	Filing Cabinet Besi	2	Buah	5,990,000
5	Locker	1	Buah	1,750,000
6	CCTV - Camera Control Television System	1	Buah	16,500,000
7	Kursi Besi/Metal	45	Buah	80,325,000
8	A.C. Split	6	Buah	50,940,000
9	A.C. Split	8	Buah	37,200,000
10	A.C. Split	2	Buah	38,500,000
11	Televisi	2	Buah	19,550,000
12	Televisi	1	Buah	5,850,000
13	Dispenser	1	Buah	3,920,000
14	P.C Unit	3	Buah	34,500,000
15	Lap Top	6	Buah	105,900,000
16	Tablet PC	3	Buah	33,210,000
17	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	Buah	4,998,000
18	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	Buah	31,400,000
19	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Buah	2,749,000
20	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Buah	2,750,000
21	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Buah	8,000,000
22	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Buah	6,850,000
23	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Buah	6,660,000
24	Alat Pendingin Lainnya	1	dummy	3,950,000
25	Drone	1	Buah	23,400,000
26	Drone	1	Buah	5,560,000
27	Teropong/Keker	2	Buah	17,238,300
28	GPS Receiver	1	Buah	3,563,100
29	GPS Receiver	1	Buah	2,624,200
30	Note Book	1	Buah	39,000,000
31	Hard Disk	1	Buah	1,800,000
32	Hard Disk	2	Buah	2,000,000
33	Compressor Udara	1	Buah	72,000,000
34	LCD Projector/Infocus	1	Buah	8,260,000
35	Camera Digital	1	Buah	32,180,000
36	Camera Digital	1	Buah	8,028,900
37	Camera Digital	1	Buah	8,314,000
TOTAL				1,034,120,500

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
TA. 2024 dan TA. 2023*

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Peralatan dan Mesin	1,034,120,500	529,024,188	95.48
Pemasangan Peralatan dan Mesin	-	3,750,000	-
Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	1,034,120,500	532,774,188	94.10
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	1,034,120,500	532,774,188	94.10

Terjadi kenaikan nilai belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023, dikarenakan terdapat belanja modal peralatan dan mesin berupa kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 1 (satu) unit, sejumlah laptop, a.c split, dan kompresor udara.

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp291.671.125*

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal sampai dengan bulan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp291.671.125 dan Rp0.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
TA. 2024 dan TA. 2023*

URAIAN	2024	2023	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	237,369,925	-	-
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	54,301,200	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	291,671,125	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	291,671,125	-	-

Belanja modal Gedung dan bangunan terdiri dari Belanja modal serta Belanja perencanaan dan pengawasan, sebagai berikut :

- Belanja modal Gedung dan bangunan senilai Rp237.369.925, antara lain :
 - ⇒ Pembangunan Gudang Logistik Stasiun PSDKP Ambon senilai Rp197.654.789;
 - ⇒ Pembangunan tempat parkir Stasiun PSDKP Ambon senilai Rp39.715.136.
- Belanja perencanaan dan pengawasan senilai Rp54.301.200, antara lain:
 - ⇒ Perencanaan teknis Pembangunan Gudang Logistik senilai Rp21.951.360;
 - ⇒ Perencanaan Teknis Termin II pembangunan Bangunan Gudang Tertutup Permanen senilai Rp5.487.840;
 - ⇒ Belanja Termin II pembangunan Bangunan Gudang Tertutup Permanen senilai Rp26.862.000.

Belanja Modal
Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp241.228.733

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai dengan periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp241.228.733 dan Rp 96.507.951.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
TA. 2024 dan TA. 2023*

URAIAN	2024	2023	%
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	198,752,363	-	0.00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	42,476,370	-	0.00
Belanja Modal Irigasi	-	-	0.00
Belanja Modal Jaringan	-	96,507,951	0.00
Jumlah Belanja Kotor	241,228,733	96,507,951	0.00
Pengembalian Belanja	-	-	0.00
Jumlah Belanja	241,228,733	96,507,951	0.00

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada stasiun PSDKP Ambon yaitu belanja modal perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan sebesar Rp42.476.470 serta belanja modal jalan dan jembatan sebesar Rp198.752.363 berupa satu unit jalan lainnya yang menjadi aset dalam bentuk paving block.

Belanja Modal
Lainnya Rp0

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Tidak terdapat belanja modal lainnya hingga periode 31 Desember 2024.

Belanja Bantuan
Sosial Rp0

B.5.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA. 2024 dan TA. 2023

Keterangan	2024	2023
Saldo UP	-	-
Kwitansi UP belum SPJ	-	-
Saldo TUP	-	-
Kwitansi TUP belum SPJ	-	-
Jumlah	-	-

Pada akhir periode pelaporan, terdapat pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP) senilai Rp191.083.921 yang telah disetorkan kembali ke negara pada tanggal 31 Desember 2024 dengan bukti Nomor NTPN 1D3E90JUQSE5HFQO.

Belanja Dibayar
di Muka
Rp16.000.000

C.2 Belanja Dibayar Dimuka

Nilai Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp16.000.000 dan Rp29.166.666. Belanja dibayar dimuka merupakan hak masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang dan jasa yang telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja dibayar dimuka antara lain sebagai berikut :

Rincian Belanja Dibayar Dimuka TA. 2024 dan TA. 2023

No.	Uraian	Nominal (Rp)
1	Sewa Bangunan Gudang Arsip senilai Rp8.000.000 masa kontrak terhitung mulai tanggal 01 Mei 2024 s.d 30 April 2025.	8,000,000
2	Belanja Sewa bangunan kantor Wilker Masohi senilai Rp8.000.000 masa kontrak terhitung mulai tanggal 29 Juli 2024 s.d 28 Juli 2025	8,000,000
Total		16,000,000

Piutang Bukan
Pajak Rp0

C.3 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp540.000 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak TA. 2024 dan TA. 2023

(dalam Rupiah)

Keterangan	2024	2023
Piutang PNB	-	-
Piutang Lainnya - Beban Tunj. Fungsional PNS	-	540,000
Jumlah	-	540,000

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca. Pada periode hingga 31 Desember 2024 tidak terdapat piutang bukan pajak pada Stasiun PSDKP Ambon.

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih -
Piutang Bukan
Pajak Rp0

C.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Stasiun PSDKP Ambon per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp(2.700), yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitur.

Tidak terdapat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak pada Stasiun PSDKP Ambon hingga 31 Desember 2024.

PIUTANG BUKAN
PAJAK (NETTO)
Rp0

C.5 PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)

Piutang Bukan Pajak (Netto) Stasiun PSDKP Ambon per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp537.300. Piutang Bukan Pajak (Netto) adalah selisih dari Piutang BukanPajak dengan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak. Tidak terdapat piutang bukan pajak (netto) hingga 31 Desember 2024.

Persediaan
Rp456.635.880

C.6 Persediaan

Nilai Persediaan sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp456.635.880 dan Rp554.341.669. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang

dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA. 2024 dan TA. 2023

(dalam Rupiah)

Jenis Barang	2024	2023
Barang Konsumsi	19,782,670	58,107,697
Suku Cadang	436,853,210	496,233,972
Jumlah	456,635,880	554,341,669

Berdasarkan Berita Acara Stok Opname Fisik Persediaan Nomor : B.3822/PSDKPSta.7/PL.450/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024. Persediaan barang konsumsi sebesar Rp19.782.670, Persediaan suku cadang alat sebesar Rp436.853.210.

Persediaan barang konsumsi terdiri dari alat tulis sebesar Rp 1.188.000, tinta tulis, tinta stempel sebesar Rp101.500, penjepit kertas sebesar Rp175.000, penghapus/korektor sebesar Rp261.000, buku tulis sebesar Rp253.000, ordner dan map sebesar Rp4.351.570, cutter (alat tulis kantor) sebesar Rp118.000, alat perekat sebesar Rp312.000, staples sebesar Rp20.000, Isi Staples Rp222.000, alat tulis kantor lainnya sebesar Rp105.000, kertas HVS sebesar Rp4.803.000, berbagai kertas Rp137.000, amplop Rp233.000, kertas dan cover lainnya Rp200.000, pita printer 75.000, tinta/toner printer Rp5.047.500, USB/Flask Disk Rp305.000, Mouse Rp610.000, Bahan komputer lainnya 310.000, batu baterai Rp242.000, serta alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebesar Rp239.500.

Persediaan suku cadang sebesar Rp436.853.210, terdiri dari suku cadang alat angkutan apung bermotor. Persediaan suku cadang merupakan persediaan yang berasal dari suku cadang kapal pengawas Hiu 13 dan speedboat milik Stasiun PSDKP Ambon.

Rincian Mutasi Persediaan

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	554,341,669
Mutasi tambah :	835,070,360
Pembelian	835,070,360
Mutasi Kurang :	(932,776,149)
Habis Pakai	(917,073,999)
Hasil Opname Fisik	(15,702,150)
Saldo Akhir per 31 Desember 2024	456,635,880

Tanah

Rp6.248.730.383

C.7 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Stasiun PSDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.248.730.383 dan Rp6.248.730.383. Mutasi aset tetap tanah adalah sebagai berikut :

Rincian Mutasi Tanah

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	6.248.730.383
Mutasi tambah :	-
Mutasi Kurang :	-
Saldo per 31 Desember 2024	6.248.730.383
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	0
Nilai Buku per 31 Desember 2024	6.248.730.383

Saldo Tanah pada Stasiun PSDKP Ambon per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.248.730.383 yang terdiri dari tanah seluas 5.838 m². Rincian data Tanah berdasarkan letak dan peruntukannya adalah sebagai berikut :

Rincian Daftar Tanah

No	Lokasi/Alamat Aset Tanah	Luasan (m2)	Bukti Kepemilikan	Pengguna
1	Dwi Warna, Kec. Banda, Kab. Maluku Tengah	572	SHP No. 00006	Satwas SDKP SBT
2	Jl. Ir. Putuhena, Rumah Tiga, Teluk Ambon, Kota Ambon	5266	SHP No. 45 & 46	Stasiun PSDKP Ambon

Peralatan dan
Mesin
Rp45.677.071.631

C.8 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp45.677.071.631 dan Rp42.957.735.716 Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	42,957,735,716
Mutasi tambah :	2,767,652,085
Pembelian (101)	1,034,120,500
Trasnfer Masuk (102)	1,696,980,000
Reklasifikasi Masuk (107)	36,551,585
Mutasi Kurang :	(48,316,170)
Reklasifikasi Keluar (304)	(36,551,585)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan (401)	(11,764,585)
Saldo per 31 Desember 2024	45,677,071,631
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	36,091,203,644
Nilai Buku per 31 Desember 2024	9,585,867,987

Saldo perolehan nilai per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp45.677.071.631. Saldo mengalami perubahan dengan adanya mutasi tambah dan mutasi kurang antara lain sebagai berikut :

- ✓ Mutasi tambah sebesar Rp2.767.652.085 yang terdiri atas :
 - Pembelian peralatan dan mesin senilai Rp1.034.120.500

No	Nama Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Total
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Unit	283,800,000
2	Alat Ukur Universal Lainnya	1	dummy	18,870,000
3	Lemari Besi/Metal	2	Buah	5,990,000
4	Filing Cabinet Besi	2	Buah	5,990,000
5	Locker	1	Buah	1,750,000
6	CCTV - Camera Control Television System	1	Buah	16,500,000
7	Kursi Besi/Metal	45	Buah	80,325,000
8	A.C. Split	16	Buah	126,640,000
11	Televisi	3	Buah	25,400,000
13	Dispenser	1	Buah	3,920,000
14	P.C Unit	3	Buah	34,500,000
15	Lap Top	6	Buah	105,900,000
16	Tablet PC	3	Buah	33,210,000
17	Printer (Peralatan Personal Komputer)	14	Buah	41,897,000
21	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	Buah	21,510,000
24	Alat Pendingin Lainnya	1	dummy	3,950,000
25	Drone	2	Buah	28,960,000
27	Teropong/Keker	2	Buah	17,238,300
28	GPS Receiver	2	Buah	6,187,300
30	Note Book	1	Buah	39,000,000
31	Hard Disk	3	Buah	3,800,000
33	Compressor Udara	1	Buah	72,000,000
34	LCD Projector/Infocus	1	Buah	8,260,000
35	Camera Digital	3	Buah	48,522,900
TOTAL				1,034,120,500

- Transfer Masuk senilai Rp1.696.980.000 berupa 1 (satu) unit Speed Boat/Motor Tempel berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara nomor B.4254/PSDKP.1/PL.450/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024.
- Reklasifikasi Masuk senilai Rp36.551.585 berupa peralatan dan mesin yang terdapat kesalahan kodefikasi barang berdasarkan Surat Keterangan Koreksi Pencatatan Modul Aset Tetap nomor B.1624/PSDKP.Sta7/PL.450/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024.
- ✓ Mutasi kurang sebesar Rp48.316.170, yang terdiri atas :
 - Reklasifikasi Keluar senilai Rp36.551.585 berupa peralatan dan mesin yang terdapat kesalahan kodefikasi barang berdasarkan Surat Keterangan Koreksi Pencatatan Modul Aset Tetap nomor B.1624/PSDKP.Sta7/PL.450/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024.
 - Penghentian aset dari penggunaan senilai Rp11.764.585 berupa laptop dan printer rusak berat yang dihentikan penggunaannya sesuai dengan Surat Persetujuan penjualan BMN dari Sekretaris Ditjen PSDKP Nomor B.6168/PSDKP.1/PL.750/XI/2023 tanggal 10 November 2023 dan telah terbit Risalah Lelang nomor 64/79/2023 tanggal 12 September 2023.

*Gedung dan
Bangunan
Rp7.580.062.080*

C.9 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp7.580.062.080 dan Rp7.288.390.955. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	7,288,390,955
Mutasi tambah :	543,627,114
Pembelian (101)	39,715,136
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP (105)	251,955,989
Reklasifikasi Masuk (107)	251,955,989
Mutasi kurang :	(251,955,989)
Reklasifikasi Keluar	(251,955,989)
Saldo per 31 Desember 2024	7,580,062,080
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	795,263,203
Nilai Buku per 31 Desember 2024	6,784,798,877

Penjelasan transaksi mutasi penambahan dan pengurangan gedung dan bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- ✓ Mutasi tambah sebesar Rp543.627.114 yang terdiri atas :
 - Pembelian senilai Rp39.715.136 berupa 1 (satu) unit bangunan tempat parkir.
 - Penyelesaian Pembangunan dengan KDP senilai Rp251.955.989 berupa 1 (satu) unit Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen dengan dokumen berita acara serah terima pekerjaan pertama (PHO) nomor 368/PSDKPSta.7/PPK/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024.
 - Reklasifikasi Masuk senilai Rp251.955.989 berupa 1 (satu) unit Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen menjadi Bangunan Gudang Tertutup Permanen 1 (satu) unit disebabkan karena kesalahan pencatatan kodefikasi dengan dokumen surat keterangan koreksi pencatatan modul aset tetap nomor B.3813/PSDKPSta.7/PL.110/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024.
- ✓ Mutasi kurang sebesar Rp251.955.989, yang terdiri atas :
 - Reklasifikasi Keluar senilai Rp251.955.989 berupa Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen menjadi Bangunan Gudang Tertutup Permanen 1 (satu) unit disebabkan karena kesalahan pencatatan kodefikasi dengan dokumen surat keterangan koreksi pencatatan modul aset tetap nomor B.3813/PSDKPSta.7/PL.110/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024.

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi
Rp836.498.084*

C.10 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp836.498.084 dan Rp595.269.351. Rincian mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	595,269,351
Mutasi tambah :	241,228,733
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	241,228,733
Mutasi kurang :	-
Saldo per 31 Desember 2024	836,498,084
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	111,957,103
Nilai Buku per 31 Desember 2024	724,540,981

Terdapat mutasi tambah yaitu penyelesaian Pembangunan dengan KDP berupa satu unit jalan lainnya menjadi aset dalam bentuk paving block sebesar Rp241.228.733.

Konstruksi

C.11 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Dalam

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp239.903.713 dan Rp239.903.713.

Pengerjaan

Rp239.903.713

Rincian Mutasi Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	239,903,713
Mutasi tambah :	493,184,722
Perolehan/Penambahan KDP	41,469,600
Pengembangan KDP	451,715,122
Mutasi kurang :	(493,184,722)
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	(493,184,722)
Saldo per 31 Desember 2024	239,903,713

Terdapat transaksi mutasi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan hingga 31 Desember 2024 . Rincian saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Satker Stasiun PSDKP Ambon, antara lain :

- Transaksi mutasi tambah KDP periode Per 31 Desember 2024 berupa perolehan/penambahan KDP senilai Rp41.469.600, dan Pengembangan KDP senilai Rp451.715.122, dengan rincian sebagai berikut :
 - **Perolehan/Penambahan KDP** senilai Rp19.518.240 untuk pembayaran langsung 80% perencanaan teknis pembangunan paving blok dengan dokumen berita acara serah terima pekerjaan nomor 074/PSDKPSta.7/PPK/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;

- **Perolehan/Penambahan KDP** senilai Rp21.951.360 untuk pembayaran langsung 80% perencanaan teknis pembangunan gudang logistik dengan dokumen berita acara serah terima pekerjaan nomor 266/PSDKPSta.7/PPK/IX/2024 tanggal 10 September 2024;
- **Pengembangan KDP** senilai Rp188.814.745 untuk pembayaran belanja termin I pembangunan paving blok sesuai berita acara pembayaran nomor 135/PSDKPSta.7/PPK/V/2024 tanggal 14 Mei 2024;
- **Pengembangan KDP** senilai Rp4.879.560 untuk pembayaran 20% pekerjaan perencanaan teknis pembangunan paving blok sesuai berita acara pembayaran nomor 138/PSDKPSta.7/PPK/V/2024 tanggal 16 Mei 2024;
- **Pengembangan KDP** senilai Rp9.937.618 untuk pembayaran 5% pekerjaan pembangunan paving blok sesuai berita acara pembayaran nomor 137/PSDKPSta.7/PPK/V/2024 tanggal 16 Mei 2024;
- **Pengembangan KDP** senilai Rp18.078.570 untuk pembayaran pengawasan konstruksi pembangunan paving blok sesuai berita acara serah terima pekerjaan nomor 140/PSDKPSta.7/PPK/V/2024 tanggal 17 Mei 2024.
- **Pengembangan KDP** senilai Rp98.827.395 untuk pembayaran belanja termin I pembangunan Bangunan Gudang Tertutup Permanen sesuai berita acara pembayaran nomor 333/PSDKPSta.7/PPK/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024;
- **Pengembangan KDP** senilai Rp5.487.840 untuk pembayaran langsung perencanaan Teknis Termin II pembangunan Bangunan Gudang Tertutup Permanen sesuai berita acara pembayaran nomor 369/PSDKPSta.7/PPK/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024;
- **Pengembangan KDP** senilai Rp88.944.655 untuk pembayaran belanja Termin II pembangunan Bangunan Gudang Tertutup Permanen sesuai berita acara pembayaran nomor 373/PSDKPSta.7/PPK/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024;
- **Pengembangan KDP** senilai Rp26.862.000 untuk pembayaran belanja Termin II pembangunan Bangunan Gudang Tertutup

Permanen sesuai berita acara pembayaran nomor 373/PSDKPSta.7/PPK/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024;

- **Pengembangan KDP** senilai Rp9.882.739 untuk pembayaran belanja Termin III pembangunan Bangunan Gudang Tertutup Permanen sesuai berita acara pembayaran nomor 380/PSDKPSta.7/PPK/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024
- Transaksi mutasi kurang KDP periode per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:
 - Transaksi penyelesaian pembangunan dengan KDP 1 (satu) unit Jalan Lainnya menjadi Aset Jalan Lainnya dengan NUP 1 seluas 525 M2 senilai Rp241.228.733.
 - Transaksi reklasifikasi KDP menjadi barang jadi 1 (satu) unit Gedung dan Banunann Dalam Pengerjaan menjadi Bangunan Gudang Tertutup Permanen dengan NUP 1 senilai Rp251.955.989, dengan berita acara serah terima pekerjaan pertama (PHO) nomor 368/PSDKPSta.7/PPK/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024.

Jumlah KDP Per 31 Desember 2024 sebesar Rp239.903.713 dengan status Henti Permanen dengan rincian sebagai berikut, antara lain:

- Transaksi KDP Henti Permanen karena adanya pemotongan anggaran terkait Corona Virus 19 di tahun 2020 sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut :
 - Perencanaan Gedung dan Bangunan Pembangunan Mess Pimpinan dengan NUP 5 senilai Rp43.035.300 progres pekerjaan Perencanaan sudah mencapai 100 % (seratus persen);
 - Perencanaan Gedung dan Bangunan Pembangunan Gudang Logistik, dengan NUP 6 senilai Rp42.896.713 progres pekerjaan Perencanaan sudah mencapai 100 % (seratus persen);
- Transaksi KDP Henti Permanen karena adanya pemotongan anggaran terkait Corona Virus 19 di tahun 2021 sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut :
 - Perencanaan Gedung dan Bangunan Pembangunan Pos Pengawasan PSDKP Seram Bagian Timur dengan NUP 7 senilai Rp97.737.550 dengan progres pekerjaan Perencanaan sudah mencapai 100 % (seratus persen);

- o Perencanaan Gedung dan Bangunan Pembangunan Mess Operator Satwas PSDKP Seram Bagian Timur dengan NUP 8 senilai Rp56.234.150 progres pekerjaan Perencanaan sudah mencapai 100 % (seratus persen)

Rekapitulasi KDP Stasiun PSDKP Ambon dapat dilihat pada tabel berikut :

Nama Barang	NUP	Uraian	Perolehan		Keterangan
			Tahun	Nilai	
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	5	Perencanaan Gedung dan Bangunan Pembangunan Mess Pimpinan	2020	43.035.300	Telah diusulkan untuk penghapusan dengan Surat Permohonan Nomor B.3508/PSDKPSta.7/TU.210/XI/2024 tanggal 26 November 2024
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	6	Perencanaan Gedung dan Bangunan Pembangunan Gudang Logistik	2020	42.896.713	Telah diusulkan untuk penghapusan dengan Surat Permohonan Nomor B.2991/PSDKPSta.7/PL.110/XI/2024 tanggal 16 Oktober 2024
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	7	Perencanaan Pembangunan Pos Pengawasan PSDKP Seram Bagian Timur	2021	97.737.550	Telah diusulkan untuk penghapusan dengan Surat Permohonan Nomor B.2991/PSDKPSta.7/PL.110/XI/2024 tanggal 16 Oktober 2024
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	8	Proyek Perencanaan Pembangunan Mess Operator Satwas PSDKP Seram Bagian Timur	2021	56.234.150	Telah diusulkan untuk penghapusan dengan Surat Permohonan Nomor B.2991/PSDKPSta.7/PL.110/XI/2024 tanggal 16 Oktober 2024
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	9	Pembangunan Gudang Logistik	2024	251.955.989	KDP Telah Menjadi Aset

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp(36.998.423.950)*

C.12 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing - masing Rp(36.998.423.950) dan Rp(32.144.343.239). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	6,248,730,383	-	6,248,730,383
2	Peralatan dan Mesin	45,677,071,631	(36,091,203,644)	81,768,275,275
3	Gedung dan bangunan	7,580,062,080	(795,263,203)	8,375,325,283
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	836,498,084	(111,957,103)	948,455,187
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Akumulasi Penyusutan		60,342,362,178	(36,998,423,950)	97,340,786,128

Aset Lain-Lain

Rp0

C.13 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Rincian Mutasi Aset Lain - Lain

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah :	-
Mutasi Kurang :	-
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Tidak terdapat mutasi tambah ataupun kurang pada Aset lain – lain hingga 31 Desember 2024.

Akumulasi

Penyusutan dan

Amortisasi Aset

Lainnya Rp0

C.14 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Utang kepada

Pihak Ketiga

C.15 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp5.675.171 dan

Rp5.675.171

Rp13.365.049 Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Utang kepada pihak ketiga pada Stasiun PSDKP Ambon berupa Belanja pegawai dan Belanja barang yang masih harus dibayar. Berikut rincian Utang kepada pihak ketiga, antara lain sebagai berikut:

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nominal
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar (212111)		2,681,171
1	Belanja Pegawai berupa kekurangan tunjangan kinerja a.n Rizqi Tatri Kusuma bulan November 2024	1,395,821
2	Belanja Pegawai berupa kekurangan gaji a.n Puji Winarno bulan Januari 2024 s/d November 2024 - Gaji Pokok PNS	1,127,500
3	Belanja Pegawai berupa kekurangan gaji a.n Puji Winarno bulan Januari 2024 s/d November 2024 - Tunjangan Suami/Istri PNS	112,750
4	Belanja Pegawai berupa kekurangan gaji a.n Puji Winarno bulan Januari 2024 s/d November 2024 - Tunj. Anak PNS	45,100
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar (212112)		2,994,000
1	Biaya langganan listrik darat Kapal Pengawas Stasiun PSDKP Ambon bulan Desember 2024	1,942,500
2	Biaya langganan air Kantor Stasiun PSDKP Ambon (Wailela), Kantor Satwas Ternate, kantor Satwas SDKP Wilker Tobelo, kantor Satwas SDKP Wilker Masohi, dan kantor Satwas SDKP Wilker Banda bulan Desember 2024	1,051,500
Total		5,675,171

*Utang Yang
Belum
Ditagihkan
Rp0*

C.16 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Pada Stasiun PSDKP Ambon, utang yang belum ditagihkan berupa kwitansi UP dan TUP yang belum di SPJ-kan.

*Uang Muka dari
KPPN Rp0*

C.17 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rp24.050.802.650 Ekuitas sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp24.050.802.650 dan Rp25.756.367.465. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

PNBP

Rp1.494.000

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan penerimaan negara bukan pajak sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.494.000 dan Rp332.470.666.

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

(dalam rupiah)

URAIAN	2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,494,000	332,470,666	(99.55)
Jumlah Pendapatan	1,494,000	332,470,666	(99.55)

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak berasal dari Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan suku cadang speedboat sebesar Rp1.494.000 yang dibayarkan melalui potongan SPM No.00467.

Beban Pegawai

Rp7.760.385.321

D.2 Pegawai

Jumlah beban Pegawai Stasiun PSKDP Ambon sampai dengan periode 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp7.760.385.321 dan Rp5.959.371.343. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Dibandingkan dengan 2023, beban belanja pada hingga 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 42%. Rincian beban pegawai sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pegawai TA. 2024 dan TA. 2023
(dalam rupiah)

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	2,376,064,000	2,203,787,640	7.82
Beban Pembulatan Gaji PNS	36,006	32,774	9.86
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	174,719,320	160,550,590	8.83
Beban Tunj. Anak PNS	56,513,512	48,979,820	15.38
Beban Tunj. Struktural PNS	12,600,000	12,600,000	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	40,180,000	36,670,000	9.57
Beban Tunj. PPh PNS	10,512,940	-	-
Beban Tunj. Beras PNS	143,391,600	141,146,580	1.59
Beban Uang Makan PNS	250,040,000	273,683,000	(8.64)
Beban Tunjangan Umum PNS	90,030,000	94,840,000	(5.07)
Beban Gaji Pokok PPPK	660,969,200	141,939,000	-
Beban Pembulatan Gaji PPPK	14,286	2,955	-
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	38,764,560	8,420,550	-
Beban Tunjangan Anak PPPK	6,160,080	1,090,810	-
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	56,640,000	12,900,000	-
Beban Tunjangan Beras PPPK	33,313,200	7,242,000	-
Beban Uang Makan PPPK	58,331,000	16,428,000	-
Beban Uang Lembur	67,541,000	59,796,000	12.95
Beban Uang Lembur PPPK	39,706,000	6,084,000	-
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	2,783,919,847	2,525,155,267	10.247
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/ Kegiatan/Kinerja PPPK	867,878,770	208,022,357	-
Jumlah Beban Pegawai	7,767,325,321	5,959,371,343	30.34

Rincian Beban Pegawai dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024
(dalam rupiah)

URAIAN	Beban	Belanja	Selisih D=C-B	Pengembalian	F=E-D
A	B	C	D	E	F
Beban Gaji Pokok PNS	2,376,064,000	2,374,936,500	(1,127,500)	-	1,127,500
Beban Pembulatan Gaji PNS	36,006	37,242	1,236	1,236	-
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	174,719,320	174,606,570	(112,750)	-	112,750
Beban Tunj. Anak PNS	56,513,512	56,468,412	(45,100)	-	45,100
Beban Tunj. Struktural PNS	12,600,000	12,600,000	-	-	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	40,180,000	40,180,000	-	-	-
Beban Tunj. PPh PNS	10,512,940	10,512,940	-	-	-
Beban Tunj. Beras PNS	143,391,600	143,391,600	-	-	-
Beban Uang Makan PNS	250,040,000	250,336,000	296,000	-	(296,000)
Beban Tunjangan Umum PNS	90,030,000	90,390,000	360,000	360,000	-
Beban Gaji Pokok PPPK	660,969,200	660,969,200	-	-	-
Beban Pembulatan Gaji PPPK	14,286	14,460	174	174	-
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	38,764,560	38,764,560	-	-	-
Beban Tunjangan Anak PPPK	6,160,080	6,160,080	-	-	-
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	56,640,000	56,640,000	-	-	-
Beban Tunjangan Beras PPPK	33,313,200	33,313,200	-	-	-
Beban Uang Makan PPPK	58,331,000	65,261,000	6,930,000	6,930,000	-
Beban Uang Lembur	60,601,000	60,601,000	-	-	-
Beban Uang Lembur PPPK	39,706,000	39,706,000	-	-	-
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	2,783,919,847	2,782,524,026	(1,395,821)	-	1,395,821
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/ Kegiatan/Kinerja PPPK	867,878,770	867,878,770	-	-	-
Jumlah	7,760,385,321	7,765,291,560	4,906,239	7,291,410	2,385,171

Terdapat selisih antara realisasi pegawai pada LRA dengan beban pegawai pada LO sebesar Rp2.385.171, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Penjelasan Selisih Realisasi Pegawai dan Beban Pegawai
(dalam rupiah)*

URAIAN	NOMINAL
Belanja Pegawai berupa kekurangan gaji a.n Puji Winarno bulan Januari 2024 s/d November 2024 - gaji pokok PNS	1,127,500
Belanja Pegawai berupa kekurangan gaji a.n Puji Winarno bulan Januari 2024 s/d November 2024 - tunj. Suami/istri	112,750
Belanja Pegawai berupa kekurangan gaji a.n Puji Winarno bulan Januari 2024 s/d November 2024 - tunj anak PNS	45,100
Jurnal balik atas belanja Pegawai berupa kekurangan uang makan pegawai a.n Achmad Yani Y, S.Pi bulan Desember 2023	(296,000)
Belanja Pegawai berupa kekurangan tunjangan kinerja a.n Rizqi Tatri Kusuma bulan November 2024	1,395,821
Jumlah	2,385,171

Beban

Persediaan

Rp153.992.397

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp153.992.397 dan Rp111.984.266. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA. 2024 dan TA. 2023

(dalam rupiah)

URAIAN BEBAN	2024	2023	%
Beban Persediaan Konsumsi	153,992,397	111,984,266	37.51
Beban Persediaan Lainnya	-	-	0.00
Jumlah	153,992,397	111,984,266	37.51

Beban Barang

dan Jasa

Rp10.393.501.09

6

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp10.393.501.096 dan Rp13.998.759.594. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA. 2024 dan TA. 2023
(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	%
Keperluan perkantoran	1,217,184,357	1,340,279,649	(9.18)
Penambah daya tahan tubuh	120,954,200	98,392,543	22.93
Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	16,705,800	14,941,400	11.81
Honor Operasional Satuan Kerja	94,012,000	147,120,000	(36.10)
Bahan	7,336,298,728	10,790,189,274	(32.01)
Honor Output Kegiatan	-	5,510,000	(100.00)
Barang Non Operasional Lainnya	916,427,805	978,366,049	(6.33)
Langganan Listrik	158,229,934	147,639,911	7.17
Langganan Telpon	109,506,070	102,610,063	6.72
Langganan Air	49,036,800	47,077,900	4.16
Sewa	147,422,666	166,848,667	(11.64)
Jasa Profesi	18,500,000	22,000,000	
Jasa Lainnya	209,222,736	137,784,138	51.85
Jumlah	10,393,501,096	13,998,759,594	(25.75)

Rincian Beban dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024
(dalam rupiah)

URAIAN	Beban	Belanja	Selisih D=C-B	Pengembalian	F=E-D
A	B	C	D	E	F
Keperluan perkantoran	1,217,184,357	1,217,184,357	-	-	-
Penambah daya tahan tubuh	120,954,200	120,954,200	-	-	-
Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	16,705,800	16,705,800	-	-	-
Honor Operasional Satuan Kerja	94,012,000	94,012,000	-	-	-
Bahan	7,336,298,728	7,336,298,728	-	-	-
Belanja Honor Output Kegiatan	-	-	-	-	-
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	916,427,805	916,427,805	-	-	-
Langganan Listrik	158,229,934	166,621,983	8,392,049	-	(8,392,049)
Langganan Telpon	109,506,070	109,506,070	-	-	-
Langganan Air	49,036,800	50,719,800	1,683,000	-	(1,683,000)
Sewa	147,422,666	134,256,000	(13,166,666)	-	13,166,666
Jasa Profesi	18,500,000	18,500,000	-	-	-
Jasa Lainnya	209,222,736	209,222,736	-	-	-
Jumlah	10,393,501,096	10,390,409,479	(3,091,617)	-	3,091,617

Terdapat selisih antara realisasi belanja barang dan jasa pada LRA dengan beban barang dan jasa pada LO sebesar Rp3.091.617, yang terdiri dari langganan listrik senilai Rp(8.392.049), langganan air senilai Rp(1.683.000), dan sewa senilai Rp13.166.666, dengan rincian sebagai berikut :

*Rincian Penjelasan Selisih Realisasi dan Beban Langganan Listrik
(dalam rupiah)*

URAIAN	NOMINAL
Jurnal Balik atas biaya langganan listrik Kantor Stasiun PSDKP Ambon (Wailela), Mess Stasiun PSDKP Ambon, dan kantor Satwas SDKP Wilker Tulehu bulan Desember 2023	(9,519,693)
Jurnal balik atas biaya langganan listrik darat Kapal Pengawas Stasiun PSDKP Ambon bulan Desember 2023	(814,856)
Biaya langganan listrik darat Kapal Pengawas Stasiun PSDKP Ambon bulan Desember 2024	1,942,500
Jumlah	(8,392,049)

*Rincian Penjelasan Selisih Realisasi dan Beban Langganan Air
(dalam rupiah)*

URAIAN	NOMINAL
Jurnal balik atas biaya langganan air kantor Satwas SDKP Wilker Tulehu, kantor Satwas Halmahera Selatan, Kantor	(2,734,500)
Biaya langganan air Kantor Stasiun PSDKP Ambon (Wailela), Kantor Satwas Ternate, kantor Satwas SDKP	1,051,500
Jumlah	(1,683,000)

*Rincian Penjelasan Selisih Realisasi dan Beban Langganan Sewa
(dalam rupiah)*

URAIAN	NOMINAL
Jurnal Balik atas sewa Bangunan Gudang Arsip mulai tanggal 01 Mei 2023 s.d 30 April 2024	7,333,333
Jurnal balik atas belanja sewa Gudang Barang Bukti Stasiun PSDKP Ambon mulai tanggal 14 Juli 2023 s.d 13 Juli 2024	12,500,000
Jurnal balik atas belanja Sewa bangunan kantor Wilker Masohi mulai tanggal 18 Juli 2023 s.d	9,333,333
Jurnal Penyesuaian atas sewa Bangunan Gudang Arsip mulai tanggal 01 Mei 2024 s.d 30 April 2025.	(8,000,000)
Jurnal Penyesuaian atas Sewa bangunan kantor Wilker Masohi mulai tanggal 29 Juli 2024 s.d 28 Juli 2025	(8,000,000)
Jumlah	13,166,666

Beban

Pemeliharaan

Rp2.389.981.540

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp2.389.981.540 dan Rp2.384.029.971. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Kenaikan beban pemeliharaan dikarenakan semakin banyak belanja barang maupun Kontrak Pekerjaan baik itu pada pemeliharaan Gedung dan Bangunan, maupun Peralatan dan Mesin serta Suku Cadang. Pemeliharaan Gedung antara lain sebagai berikut :

- Gedung Kantor dan mess Stasiun PSDKP Ambon;
- Gedung Kantor, mess, pagar, ruang tahanan, dan garasi Satwas Ternate;
- Gedung Kantor dan mess Satwas Halmahera Selatan;
- Gedung Kantor Satwas Morotai wilker Tobelo;
- Gedung Kantor Satwas Seram Bagian Timur wilker Banda.

Sedangkan pemeliharaan peralatan dan mesin antara lain pemeliharaan Kapal Pengawas, Speedboat pengawas, suku cadang kapal dan speedboat, meja dan kursi pegawai, peralatan perkantoran, dan kendaraan dinas. Rincian beban pemeliharaan sampai dengan September 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan TA. 2024 dan TA. 2023
(dalam rupiah)*

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	513,392,476	204,298,106	151.30
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,097,805,312	1,957,791,265	(43.93)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	-	-	-
Beban Persediaan Suku Cadang	778,783,752	221,940,600	250.90
Jumlah	2,389,981,540	2,384,029,971	0.25

Beban

Perjalanan Dinas

Rp3.214.261.68

2

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp3.214.261.682 dan Rp2.414.355.975. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk hingga 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas TA. 2024 dan TA. 2023
(dalam rupiah)*

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	%
Perjalanan Biasa	2,446,404,063	1,932,182,464	26.61
Perjalanan Dinas Dalam Kota	95,100,000	88,950,000	6.91
Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	46,939,000	23,900,000	-
Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	564,915,569	369,323,511	52.96
Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	60,903,050	-	-
Jumlah	3,214,261,682	2,414,355,975	33.13

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

*Beban Bantuan
Sosial Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp3.162.368.96
4*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp3.162.368.964 dan Rp3.024.691.516. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi hingga 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA. 2024 dan TA. 2023
(dalam rupiah)*

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	%
Penyusutan Peralatan dan Mesin	2,968,174,209	2,858,742,694	3.83
Penyusutan Gedung dan Bangunan	156,353,627	153,436,917	1.90
Penyusutan Jalan dan Jembatan	24,122,874	0	
Penyusutan Irigasi	8,233,934	8,233,934	92.47
Penyusutan Jaringan	5,484,320	4,277,971	(99.82)
Jumlah	3,162,368,964	3,024,691,516	4.55

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing- masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Surplus/Defisit
dari Kegiatan
Non Operasional
Rp1.867.769*

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing Rp1.867.769 dan Rp32.968.230. Rincian Kegiatan Non Operasional sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional TA. 2024 dan TA. 2023
(dalam rupiah)*

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	(1,446,269)	36,540,024	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	3,675,000	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(421,500)	103,206	(508)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0
Jumlah	1,867,769	32,968,230	(94.33)

- ⇒ Pendapatan pelepasan aset non lancar berasal dari pendapatan dari hasil lelang peralatan dan mesin dari hasil lelang peralatan dan mesin, yaitu 1 (satu) paket inventaris kantor berupa peralatan dan mesin kondisi rusak berat sebesar Rp1.446.269
- ⇒ Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya berasal dari penerimaan Kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu dari kelebihan pembayaran uang makan PNS bulan Desember 2023 a.n M, Asrar Kelian, Martin Yermias Luhulima, M. Effenfy Sadjid, Ali Tamher, dan Nedya Ibrahim dengan total sebesar Rp421.500. Nomor NTB : 000000250303 dan nomor NTPN : 83A567QLUON8KC38 tanggal 10 Januari 2024

Pos Luar Biasa
Rp0

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah Sebesar Rp0 dan Rp0.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp25.756.367.465

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas Stasiun Pengawasan SDKP Ambon untuk periode 01 Januari 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp25.756.367.465 dan Rp28.037.367.163

Defisit LO

Rp(27.071.129.231)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sampai dengan periode 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp(27.071.129.231) dan Rp(27.527.753.769). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian

*Nilai Aset
Rp0*

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Selisih Revaluasi

Aset Tetap Rp0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Aset

*Tetap Non
Revaluasi*

Rp(6.496.332)

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp(6.496.332) dan Rp59.344.684. Koreksi ini berasal dari

transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian koreksi aset tetap non revaluasi, antara lain :

Rincian Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Nama Akun	Uraian	Tanggal Jurnal	Deskripsi	Nilai (Rp)
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	Reklasifikasi Masuk	6/25/2024	Reklasifikasi Masuk Alat Rumah Tangga Lainnya	56.250
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	Reklasifikasi Masuk	6/25/2024	Reklasifikasi Masuk Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	938.672
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	6/25/2024	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Lap Top	8.000.000
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	Reklasifikasi Masuk	6/25/2024	Reklasifikasi Masuk Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	938,672
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	Reklasifikasi Masuk	6/25/2024	Reklasifikasi Masuk Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	938.672
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	Reklasifikasi Masuk	6/25/2024	Reklasifikasi Masuk Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	938,672
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	Reklasifikasi Masuk	6/25/2024	Reklasifikasi Masuk Alat Ukur Lainnya	808.050
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	Reklasifikasi Masuk	6/25/2024	Reklasifikasi Masuk Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	938.672
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	6/25/2024	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Printer (Peralatan Personal Komputer)	3.764.585
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	6/25/2024	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Lap Top	8.000.000
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	Reklasifikasi Masuk	6/25/2024	Reklasifikasi Masuk Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	938.672
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	6/25/2024	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Printer (Peralatan Personal Komputer)	3.764.585
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	6/25/2024	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Lap Top	(8.000.000)
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	6/25/2024	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Lap Top	(8.000.000)
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	6/25/2024	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Printer (Peralatan Personal Komputer)	(3.764.585)
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	6/25/2024	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Printer (Peralatan Personal Komputer)	(3.764.585)
Total				6.496.332

Koreksi Lain -
Lain Rp2.700

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain Stasiun SDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp2.700 dan Rp537.300. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain senilai Rp2.700 pada Stasiun PSDKP Ambon adalah hasil jurnal balik Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang berasal dari penyisihan piutang bukan pajak dari kelebihan pembayaran tunjangan fungsional dan tunjangan umum pegawai yang melaksanakan tugas belajar tahun 2021, a.n Lailia Nur Rohmah.

Transaksi Antar
Entitas
Rp25.372.058.0
48

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp25.372.058.048 dan Rp25.305.561.455. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

(dalam rupiah)

Transaksi Antar entitas	2024	2023
Ditagihkan ke Entitas Lain	25,375,959,817	25,676,795,226
Diterima dari Entitas Lain	(3,901,769)	(369,113,896)
Transfer Masuk	-	5,220,000.0
Transfer Keluar	-	(7,339,875.0)
Jumlah	25,372,058,048	25,305,561,455

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). sampai dengan 31 Desember 2024 , Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) sebesar Rp(3.901.769) sedangkan Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL) sebesar Rp25.375.959.817. Rincian

Diterima dari Entitas Lain (DDEL) berasal dari Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak, antara lain :

- ✓ Pendapatan dari hasil lelang peralatan dan mesin sebesar Rp1.446.269;
- ✓ Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp961.500.
- ✓ Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah berupa keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan suku cadang speedboat sebesar Rp1.494.000.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dan transfer keluar sebesar Rp0.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 Rp0.

Ekuitas Akhir
Rp24.050.802.6
50

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp24.050.802.650 dan Rp25.756.367.465.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

a. Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI

Terdapat hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas Belanja Pegawai Tugas Belajar di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal PSDKP, Stasiun PSDKP Ambon tahun 2021 yaitu senilai Rp540.000 sesuai Surat Tugas Anggota IV BPK RI Nomor: 01/ST/VI/01/2024 tanggal 9 Januari 2024, maka Stasiun PSDKP Ambon menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan BPK RI tersebut dengan menerbitkan Kode Billing Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang selanjutnya pegawai yang dimaksud melakukan pembayaran dan terbitlah Bukti Penerimaan Negara. Adapun Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) Pegawai Tugas Belajar tersebut yaitu a.n Lailia Nur Rohmah, dengan rincian sebagai berikut :

- a. NTPN: **134B82G4VPIG0K4R** senilai Rp 355.000 atas pengembalian kelebihan pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional tahun 2021.
- b. NTPN: **634EC48VVEN8QKGS** senilai Rp185.000 atas pengembalian kelebihan pembayaran Tunjangan Jabatan Umum tahun 2021.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Revisi.

1. **Revisi DIPA ke 01** DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2024 Tanggal 25 Januari 2024, kode *Digital Stamp (DS)* : 3320-9868-9676-2402 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp31.818.728.000.

Revisi 01 merupakan revisi kewenangan DJA. Kode digital stamp mengalami perubahan. Revisi 2 merupakan revisi Refocusing (pemblokiran) dan buka blokir dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Pemblokiran detail anggaran 2350.RCG.001.052.A.523121- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Cadangan AA - Servis Perlengkapan Navigasi dan Komunikasi Rp148.162.000,00)

- ✓ Pemblokiran detail anggaran 2350.RCG.001.052.C.524111- Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Cadangan AA - Uang Harian Rp2.580.000,00; Cadangan AA - Biaya Transport Rp39.390.000,00; dan Cadangan AA - Penginapan Rp5.868.000,00)
- ✓ Pemblokiran detail anggaran 2352.QIC.001.052.D.524111- Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Cadangan AA - Biaya Transport Rp60.000.000,00)
- ✓ Buka Blokir detail anggaran 2355.CAN.001.051.A.532111- Belanja Modal Peralatan dan Mesin (PC Rp34.500.000,00; Laptop 1 Rp35.300.000,00; Laptop 2 Rp74.200.000,00; dan Scanner Portable Rp6.000.000,00)
- ✓ Pemblokiran detail anggaran 2355.EBA.958.052.B.524111- Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Cadangan AA - Uang Harian Rp1.720.000,00; Cadangan AA - Biaya Transport Rp5.480.000,00; dan Cadangan AA - Penginapan Rp1.800.000,00)
- ✓ Pemblokiran detail anggaran 2355.EBA.994.002.C.523111- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Kantor Stasiun PSDKP Ambon Rp66.000,00)
- ✓ Buka Blokir detail anggaran 2355.EBB.971.051.A.523111- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Renovasi Ruang Pimpinan Rp42.000.000,00; Renovasi Ruang Rapat Rp48.000.000,00; Renovasi Ruang Kepala Urusan Umum Rp22.000.000,00; Renovasi Lobby Rp36.000.000,00; dan Renovasi Kitchen Set Rp23.000.000,00)
- ✓ Pemblokiran detail anggaran 2355.EBC.996.052.A.524111- Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Cadangan AA - Uang Harian Rp6.440.000,00; Cadangan AA - Biaya Transport Rp29.957.000,00; dan Cadangan AA - Penginapan Rp5.240.000,00)
- ✓ Pemblokiran detail anggaran 2355.EBD.961.054.A.524111- Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Cadangan AA - Uang Harian Rp1.720.000,00; Cadangan AA - Biaya Transport Rp5.480.000,00; dan Cadangan AA - Penginapan Rp1.800.000,00)

2. Revisi DIPA ke 02 DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2024 tanggal 20 Februari 2024, kode *Digital Stamp (DS)* : 3320-9868-9676-2402 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp31.818.728.000. Revisi 02 merupakan revisi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Maluku. Kode *digital stamp* mengalami perubahan.

Revisi ke 02 merupakan Revisi Anggaran Dalam Hal Pagu Anggaran Tetap dan Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan. Adapun Revisi Anggaran Dalam Hal Pagu Anggaran Tetap dan Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan tersebut antara lain :

- ✓ Perubahan nomenklatur detil 2352.CAL.001.051.A.532111-Belanja Modal Drone (Rp25.000.00,00) dan menjadi Drone bawah air dan perlengkapan (Rp25.000.00,00); dan
- ✓ Pemutakhiran RPD Halaman III DIPA pada aplikasi Sakti dan disesuaikan dengan aplikasi OMSPAN.

3. Revisi DIPA ke 03 DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2024 tanggal 4 April 2024, kode *Digital Stamp (DS)* : 3320-9868-9676-2402 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp31.818.728.000. Kode digital stamp tidak mengalami perubahan Revisi ke 03 adalah revisi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Maluku, yang merupakan Revisi Halaman III DIPA.

4. Revisi DIPA ke 04 DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2024 Tanggal 1 Mei 2024, kode *Digital Stamp (DS)* : 0331-0102-2619-2073 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp31.818.728.000. Kode digital stamp mengalami perubahan Revisi ke 04 merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran – Kementerian Keuangan. Revisi buka blokir dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Revisi Anggaran buka blokir anggaran Alokasi operasional perkantoran (002) berupa pemeliharaan barang. Usulan revisi anggaran yang dilakukan adalah Pergeseran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Kantor Stasiun PSDKP;

- ✓ Revisi Anggaran buka blokir anggaran PNPB yang terdiri dari: akun 2350.QHD.001.052.A.521211 Belanja Bahan Pelumas (1 unit kapal) dan Bahan Bakar Minyak (1 unit kapal); akun 2350.QHD.001.052.A.522191 Belanja Jasa Lainnya Ongkos Angkut BBM; akun 2350.QHD.001.052.C.521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Uang Jaga Sandar KP. Hiu 13 dan Biaya Delegasi KP. Hiu 13.

5. Revisi DIPA ke 05 DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2024 Tanggal 1 Mei 2024, kode *Digital Stamp (DS)* : 0331-0102-2619-2073 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp31.818.728.000. Kode digital stamp tidak mengalami perubahan. Revisi ke 05 revisi Halaman III DIPA dan pemutakhiran KPA.

6. Revisi DIPA ke 06

DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2024 Tanggal 08 Juli 2024, kode *Digital Stamp (DS)* : 0331-0102-2619-2073 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp31.818.728.000. Kode digital stamp tidak mengalami perubahan. Revisi ke 06 adalah revisi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Maluku, dengan rincian sebagai berikut:

- ✓ Pergeseran anggaran pada akun 2352.BIC.004.052.A.522191-Belanja Jasa Lainnya ke 2352.BIC.004.052.A.524111-Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp100.000,00;
- ✓ Pergeseran anggaran pada akun 2352.QIC.001.052.E.524119-Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp48.062.000,00 ke 2352.QIC.001.052.E.524111-Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp48.060.000,00 dan 2352.QIC.001.053.A.524111-Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp2.000,00;
- ✓ Pergeseran anggaran pada akun 2353.QIC.004.052.A.524113- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ke 2353.QIC.004.051.B.524113- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp600.000,00;

- ✓ Pergeseran anggaran pada Belanja pegawai;
- ✓ Pemutakhiran RPD Halaman III DIPA pada aplikasi Sakti dan disesuaikan dengan aplikasi OMSPAN.

7. Revisi DIPA ke 07

DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2024 Tanggal 10 September 2024, kode *Digital Stamp (DS)* : 0331-0102-2619-2073 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp31.818.728.000. Kode digital stamp tidak mengalami perubahan. Revisi ke 07 adalah revisi kewenangan KPA Stasiun PSDKP Ambon dan Revisi Halaman III DIPA, dengan rincian sebagai berikut:

- ✓ Perubahan akun yang semula 2350.QHD.001.052.B.534161 menjadi akun 2350.QHD.001.052.B.532111.
- ✓ Pergeseran anggaran pada kegiatan 2351;
- ✓ Perubahan detail pada akun 2351.BCE.UO3.051.A.524111;
- ✓ Pergeseran anggaran pada kegiatan 2352;
- ✓ Pergeseran anggaran pada kegiatan 2353;
- ✓ Pergeseran anggaran pada kegiatan 2353

8. Revisi DIPA ke 08

DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2024 Tanggal 27 September 2024, kode *Digital Stamp (DS)* : 0331-0102-2619-2073 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp31.818.728.000. Kode digital stamp tidak mengalami perubahan. Revisi ke 08 adalah revisi kewenangan Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Negara Prov. Maluku, dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Pergeseran anggaran pada kegiatan 2350;
- ✓ Perubahan pada detil akun 2350.RCG.001.051.C.523121;
- ✓ Pergeseran anggaran pada kegiatan 2352;
- ✓ Pergeseran anggaran pada kegiatan 2353;
- ✓ Pergeseran anggaran pada kegiatan 2355.

9. Revisi DIPA ke 09

DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2024 Tanggal 1 Oktober 2024, kode *Digital Stamp (DS)* : 1174-7956-5908-1644 dengan Nilai Pagu

Anggaran Rp31.818.728.000. Kode digital stamp mengalami perubahan. Revisi ke 09 adalah revisi kewenangan Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Negara Prov. Maluku, berupa Pemutakhiran RPD Halaman III DIPA pada aplikasi Sakti dan disesuaikan dengan aplikasi OMSPAN.

10. Revisi DIPA ke 10

DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2024 Tanggal 04 November 2024, kode *Digital Stamp (DS)* : 2600-0132-9098-0028 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp31.818.728.000. Kode digital stamp mengalami perubahan. Revisi ke 10 adalah revisi kewenangan Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Negara Prov. Maluku, yaitu pergeseran anggaran pada akun 2355.EBA.994.001.A.512211-Belanja Uang Lembur ke 2355.EBA.994.001.D.512414-Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK sebesar Rp51.840.000.

11. Revisi DIPA ke 11

DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2024 Tanggal 21 November 2024, kode *Digital Stamp (DS)* : 8736-8127-5885-9178 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp31.818.728.000. Kode digital stamp mengalami perubahan. Revisi ke 11 adalah revisi dalam rangka menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024. Revisi pencantuman dalam catatan halaman IV.A DIPA dilaksanakan di Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Negara Prov. Maluku.

12. Revisi DIPA ke 12

DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2024 Tanggal 11 Desember 2024, kode *Digital Stamp (DS)* : 9465-0300-0898-7917 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp32.362.728.000. Kode digital stamp mengalami perubahan. Revisi ke 12 merupakan Revisi kewenangan Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Kementerian Keuangan RI, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pergeseran anggaran 2351.BCE.U04_Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana Rp68.000.000,00 dari satker Stasiun PSDKP Ambon ke satker Stasiun PSDKP Tarakan.
- b. Penambahan output pada 2355.EBA.956_layanan BMN dari 6 layanan menjadi 7 layanan.
- c. Penambahan belanja gaji pegawai sebesar Rp612.000.000.

13. Revisi DIPA ke 13

DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2024 Tanggal 13 Desember 2024, kode Digital Stamp (DS) : 9465-0300-0898-7917 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp31.818.728.000. Kode digital stamp tidak mengalami perubahan. Revisi ke 13 merupakan Revisi kewenangan Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Negara Prov. Maluku, dengan rincian sebagai berikut: Pergeseran anggaran pada 2355.EBA.994.001.A.511125_Belanja Tunj. Pajak Penghasilan Rp4.590.000; 2355.EBA.994.001.A.512211 Belanja Uang Lembur Rp7.863.000; 2355.EBA.994.001.C.512212 Belanja Uang Lembur PPPK Rp11.312.000 ke 2355.EBA.994.001.B.512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja Rp16.265.000 dan 2355.EBA.994.001.D.512414 Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK Rp7.500.000.

14. Revisi DIPA ke 14

DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2024 Tanggal 16 Desember 2024, kode Digital Stamp (DS) : 9465-0300-0898-7917 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp32.362.728.000. Kode digital stamp tidak mengalami perubahan. Revisi ke 14 merupakan Revisi kewenangan Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Negara Prov. Maluku, dengan rincian sebagai berikut: Pergeseran anggaran pada 2355.EBA.994.001.B.512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) PNS ke 2355.EBA.994.001.B.512414 Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK sebesar Rp1.500.000

15. Revisi DIPA ke 15

DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2024 Tanggal 27 Desember 2024, kode Digital Stamp (DS) : 9465-0300-0898-7917 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp32.362.728.000. Kode digital stamp tidak mengalami perubahan. Revisi ke 15 merupakan Revisi kewenangan Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Negara Prov. Maluku, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pergeseran anggaran pada 2350.QHD.001.052.B.521211 Belanja Bahan ke 2350.QHD.001.052.A.521211 Belanja Bahan sebesar Rp1.260.000.
- b. Pergeseran anggaran pada 2350.QHD.003.052.B.521211 Belanja Bahan ke 2350.QHD.003.052.D.521211 Belanja Bahan sebesar Rp6.981.000.
- c. Pergeseran anggaran pada 2350.RCG.001.052.F.532121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ke 2350.RCG.001.052.D.532121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp420.000.
- d. Pergeseran anggaran pada 2352.BIC.004.052.A.524113_Belana Perjalanan Dinas Dalam Kota ke 2352.BIC.004.052.A.524111 Belana Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp150.000.
- e. Pergeseran anggaran pada 2353.QIC.004.052.A.524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa ke 2353.QIC.004.053.A.524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp4.440.000.
- f. Pergeseran anggaran pada 2355.EBA.958.052.A.521211 Belanja Bahan ke 2355.EBA.958.052.E.521211 Belanja Bahan Rp1.440.000.
- g. Pergeseran anggaran pada 2355.EBA.994.002.A.521111 Belanja Keperluan Perkantoran Rp7.272.000,00; 2355.EBA.994.002.A.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Rp1.080.000; 2355.EBA.994.002.G.522141 Belanja Sewa Rp2.352.000 ke 2355.EBA.994.002.E.521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Rp10.704.000.

b. Rekening Pemerintah dan NPWP Satuan Kerja

Rekening pengeluaran satker Stasiun PSDKP Ambon yaitu pada Bank Mandiri Cabang Ambon dengan Nomor rekening **8100122151411000** a.n **BPG 061 STASIUN PSDKP AMBON**. NPWP Stasiun PSDKP Ambon Nomor **00.159.696.5-941.000** a.n Stasiun PSDKP Ambon Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

c. Pagu Belanja berasal dari PNB

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-253/PB.2/2024 tanggal 16 Juli 2024 hal Penetapan Maksimum Pencairan PNB Tahap I TA 2024 pada Satker Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Stasiun PSDKP Ambon memperoleh sumber dana PNB pada belanja kegiatan 2350 (Belanja barang). Alokasi pagu (100%) senilai Rp12.901.656.000, dengan alokasi Maksimum Pencairan (MP) Tahap I sebanyak 60%, yaitu senilai 6.475.980.000 terdiri dari pembayaran Bahan Bakar, pelumas, ongkos angkut BBM, Jaga sandar, serta biaya delegasi KP. Hiu 13. Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.468.098.516 atau mencapai 99,88% dari alokasi MP Tahap I. Pembayaran anggaran UP PNB dilakukan melalui LS dan UP. Untuk UP PNB yang diterima Stasiun PSDKP Ambon sebesar Rp20.000.000 dengan pemakaian anggararan/pembayaran dengan UP Nihil PNB sebesar 19.400.000 dengan rincian pembayaran ongkos angkut BBM sebesar Rp1.700.000 dan biaya delegasi sebesar Rp17.700.000. Sisa dari penggunaan anggaran UP Nihil PNB disetorkan kembali ke negara pada tanggal 27 Desember 2024 dengan nomor NTPN 138061GCAMVBO8UQ sebesar Rp600.000. Rincian realisasi sebagai berikut :

Rincian Realisasi Pagu PNBP

URAIAN	31 Desember 2024			
	Anggaran Keseluruhan (Rp)	Anggaran Alokasi MP Tahap I (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja bahan bakar (1 unit kapal)	12,084,188,000	6,475,980,000	6,083,301,000	
Belanja pelumas (1 unit kapal)	123627000		31652316	
Ongkos Angkut BBM	115,088,000		46,500,000	
Uang Jaga Sandar KP. Hiu 13	54,593,000		45,377,300	
Biaya Delegasi KP. Hiu 13	524,160,000		261,267,900	

d. Belanja BBM Kapal Pengawas Hiu 13

Stasiun PSDKP Ambon memiliki 1 (satu) unit Kapal Pengawas yaitu Kapal Pengawasan Kelautan dan Perikanan Hiu 13. Berkaitan dengan pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) maka disampaikan tabel rincian Berita Acara Pemakaian Bahan Bakar pada periode Januari – Desember 2024, sebagai berikut :

Bulan	Tanggal BBM Awal	Sisa Volume/ BBM Awal	Pengisian	Pemakaian	Sisa BBM Akhir
Januari	02 Jan 24	13,800	-	600	13,200
Februari	31 Jan 24	13,200	-	800	12,400
Maret	29 Feb 24	12,400	-	800	11,600
April	01 April 24	11,600	-	7,600	4,000
Mei	01 Mei 24	4,000	52,000	43,900	12,100
Juni	31 Mei 24	12,100	66,000	72,550	5,550
Juli	30 Juni 24	5,550	38,000	32,000	11,550
Agustus	31 Juli 24	11,550	75,000	73,250	13,300
September	31 Agst 24	13,300	60,000	65,200	8,100
Oktober	31 Okt 24	8,100	55,000	55,350	7,750
November	31 Okt 24	7,750	27,000	21,850	12,900
Desember	30 Nov 24	12,900	5,000	13,950	3,950

Pada periode akhir Desember 2024 terdapat sisa bahan bakar minyak (BBM) berjenis Dexlite pada Kapal Pengawasan Kelautan dan Perikanan Hiu 13 yang memiliki sisa BBM sebanyak 3.950 Liter dengan nilai Rp84.589.250 yang mengikuti acuan harga per-liter nya untuk wilayah 4 (Indonesia Timur) sebesar Rp21.415.

e. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Ringkasan Nilai Penetapan Status Penggunaan
Pada Satker Stasiun PSDKP Ambon Per 31 Desember 2024*

No	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Belum Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)
1	Tanah	6.248.730.383,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	45.609.004.531	68.067.100
3	Gedung dan Bangunan	7.288.390.955,00	291.671.125
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	836.498.084	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
6	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
TOTAL		57.362.161.820	59.982.623.953

Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon adalah sebagai berikut :

*Daftar Surat Keputusan (SK) Penetapan Status Penggunaan
Stasiun PSDKP Ambon Per 31 Desember 2024*

No	No SK	Tanggal SK	Aset yang di PSP	Nilai Aset (Rp)
1	218/KEMEMKP/SJ/PL.930/2019	15 Maret 2019	Alat dan Mesin dibawah 100 jt	2.846.001.991,00
2	11/KM.6/WKN.17/KNL.01/2019	05 Maret 2019	Kendaraan	1.588.483.130,00
3	27/KM.6/WKN.17/KNL.01/2019	25 April 2019	Alat dan Mesin di bawah 100 jt	130.412.000,00
4	20/KM.6/WKN.17/2019	09 Mei 2019	Speed Boat	6.614.803.767,00
5	195/KEMEMKP/SJ/PL.930/2019	13 Maret 2019	Bangunan Air	51.148.000,00
6	23/KM.6/WKN.17/KNL.01/2019	09 April 2019	Jalan Bangunan Air dan Jaringan di atas 100 jt	326.450.000,00
7	31/KM.6/WKN.17/KNL.01/2017	05 Juni 2017	Tanah	2.024.750.000,00
8	44/KM.6/WKN.17/KNL.01/2019	27 Juni 2019	Tanah	244.736.842,00
9	53/KM.6/WKN.17/KNL.01/2019	05 Agustus 2019	Gedung dan Bangunan	4.734.997.552,00
10	735/KEMENKP/SJ/PL.930/2019	30 Oktober 2019	Jalan, Bangunan Air dan Jaringan	122.805.500,00
11	31/KEPMENKP/SJ/PL.930/2020	30 Januari 2020	Alat dan Mesin dibawah 100 jt	242.263.160,00
12	120/KM.6/WKN.17/KNL.01/2020	23 Juli 2020	Kapal Pengawas Perikanan	29.431.253.750,00
13	174/KEPMENKP/SJ/PL.930/2021	12 April 2021	Alat dan Mesin di bawah 100 jt	531.149.700,00
14	102/KM.6/WKN.17/KNL.01/2021	28 Juni 2021	Kendaraan	569.753.200,00
15	185/KM.6/WKN.17/KNL.01/2021	15 November 2021	Kendaraan	608.700.000,00
16	233/KEPMEN-KP/SJ/PL710/2022	19 April 2022	Alat dan Mesin di bawah 100 jt	428.085.430,00
17	20/KM.6/KNL.1701/2021	22 April 2022	Bangunn dan Gedung	3.905.701.955,00

18	915/KEPMENKP/SJ/PL.170/2022	21 November 2022	Alat dan Mesin dibawah 100 Jt	255.136.600,00
19	765/KEPMENKP/SJ/PL.170/2023	27 September 2023	Alat dan Mesin dibawah 100 Jt	364.855.050,00
20	198/KM.6/KNL.1701/2023	13 Desember 2023	Kendaraan	48.790.018,00
21	482/KEPMENKP/SJ/PL.710/2024	22 Mei 2024	Alat dan Mesin dibawah 100 Jt	224.767.071,00
22	716/KEPMEN-KP/SJ/PL.710/2024	30 Juli 2024	Alat dan Mesin dibawah 100 Jt	503.042.000
23	185/KM.6/KNL.1701/2024	26 September 2024	Alat dan Mesin diatas 100 jt	283.800.000
24	1113/KEPMEN-KP/PL.710/XI/2024	4 November 2024	Alat dan Mesin dibawah 100 Jt	127.650.000
25	1188/KEPMEN-KP/PL.710/XI/2024	13 November 2024	Alat dan Mesin dibawah 100 Jt	51.561.400
26	248/KM.6/KNL.1701/2024	16 Desember 2024	Jalan Lainnya	241.228.733

Aset yang belum ditetapkan status penggunaannya (PSP) adalah sebanyak 10 (sepuluh) NUP senilai Rp359.738.225 yang merupakan pengadaan tahun 2024 rincian sebagai berikut :

*Rincian Daftar BMN Yang Belum Penetapan Status Penggunaan
hingga 31 Desember 2024*

Kode Barang	Nama Barang	Kuantitas	Nilai Perolehan	Keterangan
3050105048	LCD Projector/Infocus	1	8.260.000	Pengadaan 2024
3060105038	GPS Receiver	1	2.624.200	Pengadaan 2024
3060102128	Camera Digital	3	48.522.900	Pengadaan 2024
3100201012	Hard Disk	2	2.000.000	Pengadaan 2024
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	6.660.000	Pengadaan 2024
4010102001	Bangunan Gudang tertutup Permanen	1	251.955.989	Pengadaan 2024
4010132001	Bangunan Tempat Parkir	1	39.715.136	Pengadaan 2024
TOTAL		10	359.738.225	

f. Penghapusan BMN

Selama periode 31 Desember 2024 Satker Stasiun PSDKP Ambon telah menerima 2 (dua) Surat Keputusan Menteri Kelautan dan perikanan Republik Indonesia antara lain :

1. SK Penghapusan BMN nomor 298/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/2024 tanggal 1 April 2024 tentang

Penghapusan Barang Milik Negara sebanyak 1 NUP Sepeda Motor dengan nilai sebesar Rp18.289.130;

2. SK Penghapusan BMN nomor 809/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/2024 tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara sebanyak 400 (empat ratus) NUP Alsin dengan nilai sebesar Rp1.446.268.906.

g. Jaminan Pemeliharaan

Pada Stasiun PSDKP Ambon terdapat pembangunan gudang tertutup permanen (Gudang logistik) dengan jaminan pemeliharaan dari PT. Jaminan Kredit Indonesia dengan Nomor Jaminan SBD 2024 35.00 1 00129185 tanggal 04 Desember 2025 dan besaran nilai jaminan senilai Rp9.882.739,00. Selain itu terdapat pembangunan Jalan Lainnya (paving block) dengan jaminan pemeliharaan dari PT. Asuransi Kredit Indonesia dengan Nomor Jaminan 1604.24.049.1.00046-4/00, tanggal 16 Mei 2024 dan besaran nilai jaminan senilai Rp9.937.618,20.